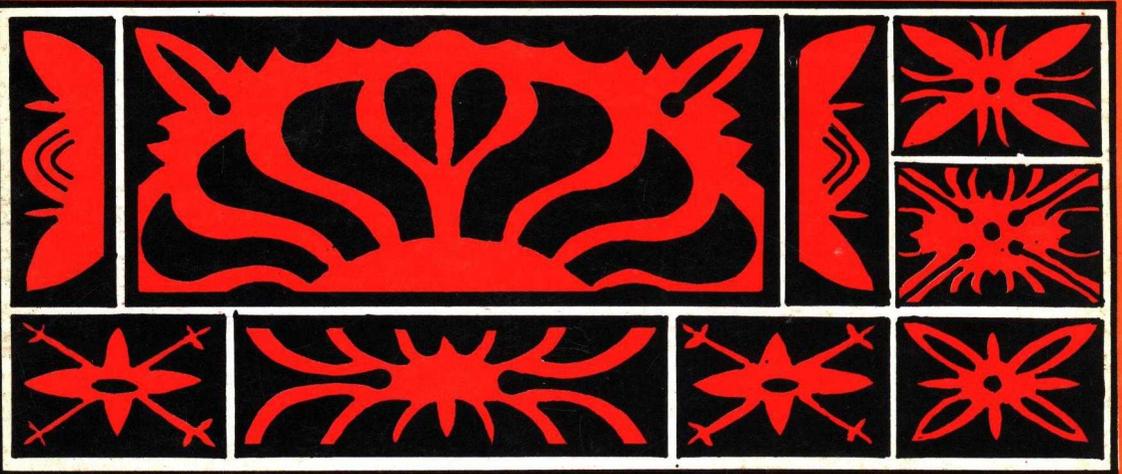




Milik Dep. DIKBUD.
Tidak diperdagangkan

**DAMPAK PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN SEKOLAH TERHADAP KEHIDUPAN
SOSIAL BUDAYA KELUARGA**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

**DAMPAK PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN SEKOLAH TERHADAP KEHIDUPAN
SOSIAL BUDAYA KELUARGA**

TIM PENELITI/PENULIS :

1. Drs. MARGYONO BUDHI M. : Ketua Tim
2. Dra. AGUSTI AYU PUTRI : Anggota

EDITOR

Drs. H.A.S. NASUTION

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI
BUDAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 1994/1995

**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL**

**PERPUSTAKAAN
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL**

Nomor induk |
Tanggal terima |
Tanggal cetak |
Bel/besih asal |
Nomor buku |
Kopi ke |

PRA KATA

Bagian proyek pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya (P2NB) DKI Jakarta yang telah menggali dan mencetak naskah-naskah kebudayaan daerah DKI Jakarta demi nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan Nasional di bidang sosial Budaya.

Pada tahun anggaran 1994/1995 Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya DKI Jakarta mencetak naskah hasil penelitian tahun 1993/1994 yang berjudul :

“Dampak pembangunan pendidikan sekolah terhadap kehidupan sosial budaya keluarga”

Dengan diterbitkannya buku ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan Bapak Direktur Ditjarahnitra, Bapak Gubernur KDKI Jakarta beserta aparatnya, Bapak Pemimpin Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat, Bapak Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta dan seluruh Tim peneliti serta semua pihak yang telah berperan serta sehingga berhasilnya penerbitan buku ini.

Sudah barang tentu buku ini masih terdapat beberapa kekurangan baik isi maupun penyajian, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat kami harapkan.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 1994
Pemimpin Bagian Proyek P2NB
DKI Jakarta,



Drs. H.A.S. NASUTION
NIP.130232972.-

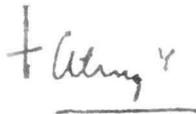
**KATA SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

1. Bahwa budaya bangsa merupakan kekayaan dan sekaligus merupakan jati diri bagi bangsa yang bersangkutan. Khasanah budaya bangsa Indonesia sedemikian tinggi, baik keluhurannya, merupakan kekayaan yang harus dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2. Salah satu pendekatan untuk mewujudkan butir 1 diatas adalah menulis dan atau membukukannya untuk kemudian disebarakan.
3. Oleh karena itu saya hargai dan sambut baik kegiatan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P2NB) DKI Jakarta yang menerbitkan naskah yang mengabarkan,

“Dampak pembangunan pendidikan sekolah terhadap kehidupan sosial budaya keluarga”

4. Saya memahami bahwa materi dari naskah buku tersebut masih jauh dari pada lengkap dan sempurna. Oleh karena itu setiap upaya dari manapun datangnya dan bermaksud menyempurnakan, jelas akan disampaikan terimakasih dan penghargaan.
5. Akhirnya semoga penerbitan naskah ini mencapai tujuannya.

Jakarta, Medio Juli 1994



Drs. H. TATING KARNADINATA.
NIP. 130055833.

DAFTAR ISI

PRA KATA,	iii
KATA SAMBUTAN KA. KANWIL DEPDIBUD DKI JAKARTA,	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah	8
1.3. Tujuan	9
1.4. Ruang Lingkup	10
1.5. Metodologi	10
1.6. Susunan Laporan	11
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	13
2.1. Latar Belakang Sejarah	13
2.2. Lokasi Dan Lingkungan Alam	14
2.3. Kependudukan	15
2.4. Perekonomian	18
2.5. Pendidikan	20
BAB III KENDALA-KENDALA DALAM PENGEMBANGAN POLA Pendidikan Nasional	23
3.1. Pendidikan Sekolah Mengancam Ketaqwaan.	23
3.2. Melunturnya Ketaatan Peserta didik terhadap Adat Istiadat Dan Orang tua	27
3.3. Pandangan Sementara Tokoh Masyarakat tentang Pendidikan Sekolah	29
3.4. Keengganan Orangtua Mengirim Anakny ke Sekolah	31
3.5. Kegiatan Belajar Mengajar Dan Kondisi Sekelilingnya	33
BABI IV IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN SEKOLAH	35
4.1. Undang Undang Pendidikan Republik Indonesia	35
4.2. Muatan Lokal Sistem Pendidikan Nasional	53
4.3. Pendidikan Sekolah Telah Terserap Kedalam Sistem Budaya Masyarakat	55
4.4. Sikap Penduduk Terhadap Pendidikan Sekolah Kejuruan/Umum	56
BAB V DAMPAK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA KELUARGA	60
5.1. Struktur Dan Komposisi Keluarga	60
5.2. Pola Menetap Setelah Kawin	60
5.3. Usia Kawin Dan Kematangan Perkawinan	62
5.4. Pandangan Terhadap Pendidikan	62
5.5. Pandangan Terhadap Kesehatan	63

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	65
Lampiran:	
1. Questioner	71
2. Daftar Pustaka	75
3. Daftar Informan	77
4. Peta	81
5. Gambar	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Kegiatan pendidikan di Indonesia sudah ada dan berkembang sejak jaman nirleka. Pada jaman itu banyak ditemukan tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, gambar-gambar dinding gua yang tersebar di beberapa daerah diseluruh nusantara. Menyaksikan relief yang terdapat pada dinding-dinding candi besar, dapat kita baca kata-kata mulia peninggalan dari salah satu abad. Hal ini sudah dapat meyakinkan kepada kita bahwa orang Indonesia kuno telah memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pendidikan.

Relief yang terdapat pada candi-candi besar, dan naskah-naskah yang dapat ditemukan di beberapa daerah, telah merupakan petunjuk kearah itu. Pada jaman itu Indonesia berada dalam situasi budaya yang mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Asia dominan budaya India. Misalnya ketika itu ditemukan lembaga pendidikan yang mereka namakan Mandala. Ketika datang pengaruh kebudayaan Islam di nusantara, lembaga pendidikan yang bernama Mandala berubah menjadi Pesantren. Baik lembaga mandala maupun pesantren, memiliki pola yang sama dalam mengelola peserta didik atau murid. Mereka senantiasa dapat berhubung langsung dengan gurunya dan tidak terbatas oleh waktu di kelas.

Mereka tinggal dalam sebuah asrama di dalam lingkungan sekolah. Kehidupan di dalam asrama diatur oleh kepala asrama. Kepala asrama bertugas dan berfungsi sebagai kepala rumah tangga yang mengatur seluruh kebutuhan anak asuhannya. Serta kebutuhan - kebutuhan layaknya dalam sebuah rumah tangga atau keluarga . Dari sistem seperti ini kemudian muncul lembaga-lembaga keagamaan yang beraneka ragam coraknya. Lembaga seperti ini banyak jumlahnya, dan terdapat disemua lapisan masyarakat.

Lembaga seperti ini biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai suatu

susunan pola-pola kepercayaan dan perilaku yang berhubungan dengan alam gaib. Ketika itu besar lapisan masyarakat pada umumnya memiliki pemikiran-pemikiran perihal alam gaib, perihal supranatural yang kemudian menugasi agama untuk memberikan arah dan tujuan yang benar berorientasi pada kehidupan.

Dari norma-norma dan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan misalnya ; pembinaan di bidang pertanian, perlindungan dalam peperangan, perlindungan untuk kesuburan keturunan, pembinaan para pemimpin dalam penerapan kebijakan di pemerintahan dan lain-lain sebagainya.

Lembaga-lembaga agama waktu itu berperanan memberikan dasar bagi peraturan-peraturan kesusilaan dalam masyarakat. Mereka berkepentingan memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan yang telah ada berupa adat kebiasaan atau kelaziman yang berlaku. Dalam beberapa hal mereka dapat menjadi dasar/ dan panutan nilai-nilai kesusilaan. Misalnya nilai yang muncul akibat proses pernikahan, dan nilai lain yang terdapat dalam masyarakat.

Hal lain kadang-kadang di dalam pelaksanaan upacara ritual peribadatan dapat menyentuh perasaan pelaku, hal seperti ini tidak terdapat dalam kegiatan gotong royong biasa, kesetia kawan, hidup hemat atau hidup sederhana.

Suatu ketika unsur keagamaan memiliki tugas dan fungsi yang cukup dominan, para ulama memiliki pengaruh yang sangat kuat, di dalam pemerintahan, sehingga para pemimpin agama juga merangkap sebagai kepala pemerintahan. Hal seperti ini banyak terjadi pada suku bangsa yang hidupnya masih sangat bersahaja.

Keadaan seperti ini baru berubah ketika bangsa Belanda sebagai penguasa di tanah air waktu itu memperkenalkan sistem pendidikan yang sedang berlaku di tanah asalnya.

Pertemuan dan pemberian Ilmu pengetahuan kepada peserta didik berlangsung hanya pada jam-jam belajar yang sangat terbatas. Selebihnya peserta didik dikembalikan kepada keluarga, sehingga kemajuan atau kemunduran peserta didik tidak lagi dapat sepenuhnya dibebankan kepada guru.

Pola yang bagaimana yang diterapkan senantiasa memiliki hal-hal yang baik atau positif dan memiliki hal-hal yang tidak baik atau negatif. Adalah menjadi tugas kita untuk mengupayakan sedemikian rupa agar unsur negatif tidak berkembang. Sebaliknya unsur positif harus terus diupayakan untuk dapat berkembang dan bahkan dapat meningkat. Sebagai landasan untuk menuju dan mencapai kearah itu telah diupayakan dan kini telah kita miliki beberapa

sarana dan prasarana, yang berfungsi sebagai penunjang dan pendukung.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 misalnya, menugasi kepada kita yang ditugaskan dalam bentuk berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah, tentunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kehidupan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjabaran hal tersebut diatas terdapat di dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Disini dengan tegas menyatakan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, diatur dengan Undang-Undang.1)

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, telah dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1993, diantaranya masyarakat bahwa, pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta ditujukan kepada peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kemampuan serta kesempatan setiap warga negara untuk turut serta dalam pembangunan dan menempuh kehidupan sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.2)

Sejak kita merdeka, sudah dilakukan melalui berbagai upaya untuk melakukakan amanat yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 di nyatakan bahwa, "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan diatur oleh undang-undang. Tetapi tidaklah berarti bahwa, hanya pemerintah saja yang boleh dan benar untuk menyelenggarakan pendidikan . Sejak dahulu penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah juga oleh pihak swasta. Karena untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik perlu di uraikan kedua penyeleng-

garaan pendidikan tersebut, yaitu pendidikan pemerintah dan pendidikan swasta.

Pendidikan Dasar.

Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta terdiri atas tingkatan : Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Oleh karena itu untuk memperoleh urutan yang baik sesuai dengan tingkatannya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta secara berurut dibicarakan disini.

Pendidikan Dasar Pemerintah. Corak dan pelaksanaan pendidikan suatu bangsa erat hubungannya dengan corak dan kehidupan masyarakat, sedangkan kehidupan masyarakat besar sekali di pengaruhi oleh bentuk dan corak kekuasaan yang berlaku. Dengan demikian pembicaraan mengenai pendidikan perlu dihubungkan dengan corak kehidupan masyarakat yang ditandai dengan jenis kekuasaan dan bentuk pemerintah yang sedang berlaku.

Menurut perkembangan upaya-upaya dibidang pembangunan pendidikan-an dapat dibedakan menjadi tiga periodisasi ialah:

- a. Periodisasi sejak tahun 1892-1929, dapat di uraikan keberadaan sistem pendidikan sekolah pada jaman penjajahan Belanda seperti dibawah ini. Pada tahun 1892 mulai diadakan sistimatisasi dalam sistem pendidikan yang berbeda-beda dari satu pulau kepulau lainnya. Pada waktu itu seluruh sekolah dasar dikelompokkan menjadi dua macam saja. Macam pertama dinamakan Eerste School (Sekolah Angka Satu). Sekolah ini hanya menampung murid-murid dari golongan priyayi dan hanya didirikan diibukota keresidenan. Lama pendidikan lima tahun, kurikulumnya meliputi membaca, menulis, berhitung, Ilmu bumi, sejarah, menggambar, ilmu alam dan ilmu ukur tanah. Gurunya diambil dari lulusan sekolah guru, bahasa pengantar bahasa daerah, tetapi pada tahun 1907 dirobah menjadi bahasa Belanda. Kemudian lama pendidikan ditingkatkan menjadi enam tahun.

Dengan adanya sekolah Angka Satu ini, semua sekolah raja yang didirikan sejak 1879 dihapus, kecuali yang di Magelang. Sekolah raja disini dijadikan sekolah Kejaksaan.3)

Jenis sekolah kedua yang didirikan pada tahun 1892 adalah Tweede School (Sekolah Angka Dua). Sistem sekolah ini ditujukan untuk rakyat, umumnya

Bahan penataran bagi penatar HP-7 pusat 1990.7.1)
Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993.80.2).

didirikan dipedesaan. Lama pendidikan hanya lima tahun. Kurikulumnya terdiri dari pelajar, membaca, menulis dan berhitung. Bahasa pengantar bahasa daerah setempat, jika tidak ada bahasa daerah diganti dengan bahasa Melayu. Tatkala politik etika dilancarkan muncul dua pendapat bahwa, untuk meningkatkan sistem pendidikan dasar untuk penduduk yang paling tepat dalam sistem sekolah desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Sistem sekolah desa mulai di bangun pada tahun 1907, sekolah ini didirikan didaerah pedesaan dan masyarakat diberikan tanggung jawab dalam pembinaan. Pembinaan pusat ada pada Departemen Dalam negeri dan hanya sampai tahun 1918.

Kurikulum sekolah Angka Dua tidak mengalami perubahan, hanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pedesaan, sekolah ini pada tahun 1929 ditutup karena adanya krisis ekonomi.

Pada tahun 1914 terjadi tiga perubahan penting dalam sistem pendidikan rendah ini. Pertama sekolah Angka Satu yang sejak tahun 1907 telah menggunakan bahasa Belanda, sekolah ini didirikan di ibukota Kerisidenan, dipergunakan oleh anak-anak priyayi dan juga untuk golongan lain. Kedua pada waktu itu didirikan juga sekolah lanjutan yang diberinama *Mear Uitgebreid Leager Onderwijs (MULO)*, untuk Lulusan sekolah angka satu. Lama pendidikan tiga tahun bahasa pengantar bahasa belanda. Ketiga pada waktu itu juga didirikan *Vervolg School* untuk menampung sekolah desa. Lama pendidikan Lima tahun, bahasa pengantar bahasa belanda, kurikulum sama dengan kurikulum HIS. Pendidikan Lanjutan atas untuk penduduk kepulauan Indonesia didirikan *Aglemeen Middel baar School (AMS)* yang menerima lulusan MULO.

- b. Periodesasi sejak tahun 1929 - 1933 dapat ditemukan beberapa sekolah yang telah memiliki ciri nasional misalnya :
1. Sekolah Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro.
 2. Sekolah Setia Hati, ini sekolah swasta yang kedua.
 3. *Vervolg School* atau sekolah Rendah yang kemudian berubah menjadi sekolah Rakyat.
- c. Periodesasi sejak tahun 1945 - 1947, ketika jepang menduduki Indonesia, mulai diadakan perombakan dari sekolah yang berjiwa kolonial, berubah corak menjadi sekolah-sekolah jepang. Pada periode ini ditemukan sekolah-sekolah dibawah samurai Jepang misalnya :

1. Hutsu Chu Gakko (Sekolah Menengah Umum),
2. Katto Chu Gakko (Sekolah Menengah Atas) ,
3. Kyo Inyo Saidyo (Sekolah Guru Desa),
4. Sihan Gakko (Sekolah Guru B),
5. Katto Sihan Gakko (Sekolah Guru A),

Pada periode tahun lima puluhan sampai dengan tahun 1959 pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya, walaupun pada waktu itu disana-sini terjadi pemberontakan. Ketika dekrit presiden dikumandangkan diseluruh nusantara, kita memulai kehidupan baru, yaitu kehidupan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan pendidikan tidak berhenti dan bahkan menunjukkan arah peningkatan yang pesat. Namun kemudian muncul hambatan yaitu meletusnya gerakan Tigapuluh September tahun 1965.

Pembersihan terhadap pelaku-pelaku pemberontakan berjalan lancar, bangsa Indonesia mulai pada kehidupan baru, kehidupan yang bertatanan baru.

Orde baru lahir dengan segala macam program tatanan kehidupan baru, diantaranya tatanan di bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan terus dilaksanakan dari pelita ke pelita, yang akhirnya akan segera kita akhiri program Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama.

Kini kita telah memiliki seperangkat peraturan untuk pelaksanaan pendidikan nasional ialah, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana operasional. Selain delapan peraturan pemerintah tersebut masih dilengkapi sebuah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelengkapannya.

Rincian Peraturan Pemerintah terurai sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. Berisi mengenai pembinaan pendidikan di lingkungan Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan juga pendidikan prasekolah. Disamping sebagai Wahana Sosialisasi awal sebelum pendidikan dasar, dikembangkan agar lebih mampu meletakkan landasan pembentukan watak dan kepribadian. Penanaman dan pengenalan agama dan budi pekerti serta dasar pergaulan. Dalam hal ini perlu keteladanan dan pengembangan suasana yang membantu meletakkan dasar kearah pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Berisi mengenai pendidikan dasar sebagai jenjang awal pendidikan di sekolah lebih ditingkatkan pemerataan, kualitas dan pengembangannya. Agar dapat memberikan dasar pembentukan pribadi manusia sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara yang berbudi luhur, beriman dan taqwa. Berkemampuan dan berketrampilan dasar sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya atau untuk bekal hidup dalam masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Berisi mengenai pengembangan pendidikan Menengah sebagai lanjutan pendidikan dasar disekolah ditingkatkan agar mampu membentuk pribadi manusia yang beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berbudi pekerti luhur, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Memerlukan tenaga yang berkemampuan dan trampil, Perlu diadakan penyesuaian kurikulum dan isi pendidikan serta penataan kelembagaan pendidikan Menengah untuk bekal ke pendidikan tinggi dan hidup di lingkungan masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Berisi mengenai pembinaan, pengembangan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mampu, memiliki kemampuan akademi atau profesional. Mampu memimpin, tanggung jawab terhadap kebutuhan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berjiwa pengabdian, memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditingkatkan melalui kegiatan penelitian. Kehidupan kampus dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Pendidikan Tenaga Kependidikan,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Pendidikan Nasional dan peranserta masyarakat,
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/93 tentang gelar dan sebutan Lulusan Perguruan Tinggi. (Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993.288).

Secara operasional kegiatan pembangunan pendidikan dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993. Diantaranya menyatakan bahwa,kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan semua jenis dan jenjang pendidikan diselenggarakan pemerintah dikembangkan secara merata diseluruh tanah air. Dengan memberikan perhatian khusus peserta didik yang kurang mampu, penyandang cacat serta yang bertempat tinggal di daerah terpencil

1.2. M A S A L A H

Keluarga ini pada umumnya berasal dari beraneka ragam suku bangsa, beraneka ragam tanah asal kelahiran, kebinekaan bahasa daerah atau dialek, kebinekaan kebudayaan, kebinekaan sosial ekonomi dan aneka ragam latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Pembangunan Nasional mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk didalamnya pembangunan dibidang pendidikan. Pembangunan Pendidikan program penyetaraan diploma dua bagi guru sekolah dasar di wilayah Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Madya Jakarta Pusat.

Setelah dilakukan penelitian dilapangan penulis menemukan dua masalah, dan masalah ini perlu di temukan jawabannya. Dua masalah tersebut diatas ialah : 1. Pembangunan pendidikan program penyetaraan diploma dua Guru Sekolah Dasar dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya keluarga. 2. Hasil program penyertaraan diploma dua Guru Sekolah Dasar dan pengaruhnya bagi kehidupan sosial budaya keluarga.

Mereka bekerja dan bertugas pada satu profesi, dalam suatu kebersamaan profesi yaitu sebagai seorang pendidik untuk anak-anak manusia. Mereka bertugas untuk memanusiakan anak manusia. Semestinya mereka bangga, bahagia dan bersyukur karena terpilih menjadi peserta didik penyetaraan diploma dua. Dengan harapan nanti akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dapat menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidupnya, ini artinya pengaruh positif sosial budaya keluarga dapat dicapai.

Tetapi kenyataan yang diterima lain, bukan seperti yang disebut diatas, tetapi justru yang sebaliknya. Kehidupan mereka tidak harmonis lagi. Perilaku mereka cenderung mengalami kemunduran. keberadaan seorang peserta didik, yang kebetulan seorang istri relatif jarang dirumah, sebab pada hari minggu untuk waktu selama tiga tahun tidak berada dirumah secara terus menerus, waktu pagi, siang dan sore. Hubungan antara suami dan istri dalam keluarga serta dengan anak kurang harmonis/ baik.

Hubungan keluarga dengan masyarakat sekitar merosot, karena kesempatan bertemu untuk tatap muka jarang. Kebiasaan yang baik yang biasanya dikerjakan, umpamanya kerjabakti / senam bersama, jalan bersama tiap hari minggu, tidak lagi sempat dilakukan. Itu sebabnya kegiatan adat seperti upacara pernikahan (perkawinan) cara betawi tidak lagi pernah ditemukan. Penyebabnya karena sulit ditemukan penduduk asli betawi di wilayah ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti berusaha menggali dan menemukan jawabannya, sejauh mana pengaruh pembangunan dibidang pendidikan terhadap kehidupan sosial budaya keluarga di wilayah kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang , Walikota Madya Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjadi.

Untuk mengungkap semua masalah tersebut di atas, yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini adalah mengangkat kepermukaan pembangunan pendidikan program penyetaraan diploma dua terhadap kehidupan sosial budaya keluarga guru sekolah dasar di wilayah ini.

1.3 T U J U A N

Tujuan penelitian, Dampak Pembangunan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Keluarga Mahasiswa Penyetaraan Diploma dua Guru Sekolah Dasar Di kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimaksud untuk mengungkapkan adanya pengaruh pembangunan pendidikan penyetaraan Diploma dua Guru Sekolah Dasar di Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, Daerah khusus ibukota jakarta. Dimaksud untuk mengungkapkan adanya pengaruh pembangunan pendidikan penyetaraan Diploma dua, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial budaya keluarga, Terutama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku serta kehidupan religiusnya.

Tersedianya data, responden dan informan yang memiliki hubungan dengan pengaruh pembangunan pendidikan terhadap kehidupan sosial budaya keluarga peserta didik penyetaraan Diploma dua Guru Sekolah dasar tersebut, diharapkan pada gilirannya dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terutama yang menyangkut perilaku kehidupan sosial budaya. Serta perbaikan jadwal perkuliahan mahasiswa penyetaraan diploma dua.

Setelah ditemukan analisa dari data penelitian, dicoba untuk mencari jawaban atau keterangan mengenai berbagai masalah yang ditemukan dalam

penelitian ini. Di upayakan untuk menemukan jawaban karena adanya dampak negatif yang terdapat di lapangan. Diupayakan bagaimana cara yang paling baik dan efektif serta efisien dalam mengatasi kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pembangunan di bidang pendidikan.

1.4. Ruang lingkup

Sesuai tema penelitian dan judul yaitu ; Dampak Pembangunan Pendidikan Terhadap Sosial Budaya Keluarga Mahasiswa Penyetaraan Diploma dua Guru S D dikelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Walikotamadya Jakarta Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Dalam Penelitian ini akan menggali informasi yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Struktur dan komposisi keluarga,
- b. Pola menetap penduduk setelah kawin,
- c. Usia kawin dan kematangan usia perkawinan,
- d. Variasi lapangan pekerjaan dan
- e. Adat istiadat dalam kehidupan.

Pemilihan lokasi di wilayah ini karena disesuaikan adanya asumsi bahwa di wilayah ini dilaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan atau peningkatan di bidang pendidikan. Upaya tersebut ialah program penyetaraan diploma dua bagi guru-guru Sekolah Dasar. Ini sudah berlangsung selama tiga tahun. Artinya sudah mengeluarkan satu angkatan. Sebagai data primer diambil melalui penelitian, pengkajian dan penggalian informasi dari responden, informan atau data kepustakaan, mengenai ; struktur dan komposisi keluarga, pola menetap penduduk setelah kawin , usia kawin dan usia perkawinan, variasi lapangan pekerjaan dan adat istiadat dalam kehidupan keluarga. Latar belakang budaya. kondisi ekonomi dan sosial budaya keluarga, serta situasi dan kondisi keluarga setelah penyetaraan.

1.5. Metodologi

Studi kepustakaan dilakukan sebelum penelitian, ini merupakan langkah awal kegiatan tim. Hal ini dilakukan karena tim merasa perlu dibekali kerangka teoritis yang selanjutnya sangat berguna bagi penulisan laporan penelitian. Kemudian tim menyusun questioner yang akan disebarakan yang nantinya untuk disebarakan dan diisi oleh responden. Banyaknya responden yang diperlukan sekitar seratus lima puluh orang.

Penelitian dimulai bulan Juli dan akan berakhir bulan Desember tahun 1993 secara serentak dengan tim-tim yang lain. Selanjutnya disamping respon-

den diperlukan untuk pengumpulan data yang lebih lengkap melalui, beberapa orang informan. Tokoh-tokoh misalnya ; tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, alim ulama, budayawan, seniman, usahawan dan pejabat yang dinilai dapat mewakili secara keseluruhan sasaran penelitian. Bulan berikutnya tim membuat laporan hasil dari masing-masing anggota, untuk selanjutnya diolah dan terakhir dituangkan dalam bentuk naskah.

Secara garis besar, isi naskah dapat dikemukakan sebagai berikut : Bab. I Pendahuluan, dalam bab ini dibicarakan tentang latar belakang, masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan metodologi penelitian serta susunan laporan. Bab II Gambaran Umum, dalam bab ini dibicarakan masalah lokasi dan lingkungan alam, lingkungan fisik, kependudukan, latar belakang sosial budaya dan pendidikan. Bab III kendala dalam pengembangan pola pendidikan nasional, dalam bab ini dibicarakan masalah pandangan masyarakat atas dasar budaya / religi, pandangan negatif masyarakat terhadap sekolah, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap sekolah dan pendidikan sekolah telah terserap kedalam sistem budaya masyarakat di daerah khusus Ibukota Jakarta. Bab IV Pandangan terhadap Pendidikan Sekolah, bab ini membicarakan masalah pandangan positif masyarakat terhadap sekolah, pandangan negatif masyarakat terhadap sekolah, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap sekolah dan pendidikan telah terserap kedalam sistem budaya masyarakat Betawi. Bab V Dampak Perkembangan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Keluarga, bab ini membicarakan masalah struktur dan komposisi keluarga, pola menetap setelah kawin, usia kawin dan kematangan perkawinan, variasi lapangan pekerjaan dan pandangan terhadap kesehatan. Bab VI kesimpulan, dalam bab ini dibicarakan tentang analisa data yang telah diperoleh dan saran yang merupakan jalan keluar untuk menjawab masalah-masalah yang ditemukan di lapangan, indek dan kepustakaan.

1.6. Susunan Laporan

Penelitian ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri seorang ketua merangkap anggota dan beberapa anggota. Pada tahap persiapan ketua bertanggung jawab membuat dan meneruskan rencana penelitian, selanjutnya diusulkan kepada pimpinan bagian proyek (Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian Dan pembinaan Nilai Nilai Budaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta), dan setelah disetujui usulan penelitian dilengkapi surat ijin penelitian dan lain lain sebagainya.

Untuk melengkapi perencanaan penelitian ini, tim membicarakan lang-

kah langkah yang akan dibahas. Langkah pertama yang akan dibahas adalah permasalahan pokok penelitian yang masih perlu dimantapkan. Setelah pokok permasalahan disepakati, tim membicarakan langkah-langkah selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan berikut jadwal penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Untuk itu diperlukan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesener kepada responden, wawancara kepada informan yang telah ditetapkan, observasi dan pengamatan langsung serta studi kepustakaan yang menunjang tema penelitian.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah tersusunnya sebuah naskah laporan penelitian yang memiliki gambaran dan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

2.1. Latar Belakang Sejarah.

Wilayah yang kami pakai sebagai sample dalam penelitian Dampak Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat DKI Jakarta adalah Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang di Jakarta Barat.

Pada mulanya pertumbuhan Kecamatan Tanah Abang ini berawal dari zaman penjajahan Belanda, yang pada masa itu disebut Onder District yaitu merupakan pemerintahan daerah dibawah Kewedanan. Onder District ini terdiri dari beberapa wijk yang berarti kampung sebagai berikut dibawah ini :

1. Wijk Petojo terdiri dari kampung Petojo Sawah, Petojo Udik dan Kebon Jahe
2. Wijk Slipi terdiri dari kampung Slipi dan Pakembangan
3. Wijk Jati terdiri dari kampung kotabambu dan petamburan
4. Wijk Jipang terdiri dari Kampung Jipang dan Bendungan

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya wilayah tersebut diatas mengalami perubahan sejak tahun 1966 berdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 1966 Nomor 18/3/II/1/66, menjadi dua kelurahan yaitu Kelurahan Karet dan Kelurahan Tanah Abang.

Adapun kelurahan Karet kemudian berkembang lagi sebagaimana bentuknya sekarang ini, telah berubah menjadi Kecamatan Setiabudi Kota Madya Jakarta Selatan. Sedangkan Kelurahan Tanah Abang berubah menjadi Kecamatan Tanah Abang dan dibagi menjadi tujuh kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Gelora, meliputi Kampung yang dahulu merupakan Kampung Jipang, Petunduan, sebagian dari Kampung Bendungan serta sebagian dari Kampung Pakembangan.
2. Kelurahan Bendungan Hilir, meliputi sebagian dari kampung Bendungan dan Sebagian dari Karet Bendungan.
3. Kelurahan Karet Tengsin, meliputi Karet Pasar Baru dan Karet Bendungan.
4. Kelurahan Petamburan, meliputi Wijk Jati dahulu dan Kampung Petamburan/ Jati.

5. Kelurahan Kebon Melati, meliputi Kampung Pasar Baru Karet.
 6. Kelurahan Kebon Kacang, meliputi Kampung Pasar Baru Tanah Abang
 7. Kelurahan Kampung Bali, meliputi Kampung Bali Tanah Abang.
- (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Tanah Abang Tahun 1993/1994).

2.2. Lokasi dan Lingkungan Alam

Kelurahan Bendungan Hilir sebagai salah satu dari tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Tanah Abang tersebut diatas mempunyai luas lebih kurang 158,16 Ha; dan kemudian diadakan perubahan batas-batas wilayah kelurahan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1251/86 dan 1227/89 tentang penyempurnaan, pemecahan, penyatuan, penetapan batas, perubahan nama kelurahan yang kembar/ sama dan penetapan luas wilayah Kelurahan Bendungan Hilir, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Di sebelah Utara di batasi Rel kereta Api yang merupakan perbatasan dengan Kelurahan Petamburan.
2. Di sebelah Timur dibatasi oleh Kali Krukut dan Kali Malang berbatasan dengan Kelurahan Karet Tengsin dan Kelurahan Kebon Melati.
3. Di sebelah Selatan, batasnya adalah jalan Jenderal Sudirman berbatasan dengan Kelurahan Karet Semanggi Jakarta Selatan.
4. Di sebelah barat, batasnya adalah jalan Gotot Subroto, berbatasan dengan Kelurahan Gelora (Laporan Tahunan Kelurahan Bendungan Hilir Tahun 1992/1993).

Letak wilayah Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang berada pada bujur Timur 160 derajat 48,66 dan Lintang Selatan 6 derajat 14,13 serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 6-10 meter diatas permukaan air laut. Sebagian dari kelurahan ini masih tetap mengalami banjir di musim penghujan, terutama yang biasanya terkena luapan banjir adalah rumah - rumah di dataran sungai disekitar Kali Krukut.

Wilayah Kelurahan Bendungan Hilir ini dibagi menjadi 8 Rukun Warga (RW) dan terdiri dari 114 Rukun Tetangga (RT) Yaitu RW. 01, RW.02, RW. 03, RW. 04, Rw. 05 Dan RW.06, RW. 07 dan RW. 08. Mengenai peruntukkan tanah perumahan di wilayah kelurahan Bendungan Hilir ini sebagian besar berada di lingkungan RW.01, RW.02 dan RW.05 yang dulunya berasal dari tanah Kavling. Sedangkan sebagian besar yang berada dilingkungan RW.03, Rw.04, dan RW.06, berasal dari tanah dan rumah milik negara (gedung-ge-dung negara) yang sebagian besar diantaranya sedang dimohon hak penggunaan

nya melalui kantor Agraria dengan status Hak Guna Bangunan. Sebagian tanah lainnya yang berada di Rw.08 sampai sekarang masih berstatus tanah milik negara.

Tanah yang termasuk Lingkungan kumuh terdapat di RW.07 dan RW.08. Dari luas tanah seluruhnya 158,16 Ha, Kelurahan Bendungan Hilir dibagi menjadi 8 Rukun Warga dan 114 Rukun Tetangga yang sebagian besar merupakan lingkungan pemukiman, dimana di tengah-tengahnya mengalir sebuah sungai kecil yaitu Kali Ciragil yang bermuara di Kali Krukut. Sungai inilah yang sering meluap airnya apabila musim penghujan datang sehingga rumah-rumah disekitarnya mengalami banjir.

Lokasi daerah penelitian dapat di capai dengan mudah, hal ini dimungkinkan oleh karena sarana dan prasarana transportasi menuju ke lokasi penelitian cukup bagus. Adapun kendaraan yang dapat di tumpangi menuju daerah penelitian ada tiga macam yakni :

1. Bus kota dari arah Cililitan ke Grogol, dari Grogol ke muara karang, dari Grogol ke Rawamangun dan dari Blok M ke Kota.
2. Bus Umum dari Tanah Abang ke Kebon Jeruk. dari Tanah Abang ke Lebak Bulus, dari Tanah Abang ke Blok M dan dari Tanah Abang ke Pasar Minggu.
3. Bemo dari Tanah Abang ke Benhil dari Benhil ke Grogol.

2.3. kependudukan

Penduduk Kelurahan Bendungan Hilir secara keseluruhan berjumlah 34.337 orang, terdiri dari warganegara Indonesia (WNI) dan Warganegara Asing (WNA). Penduduk yang berstatus WNI jumlah Laki-Lakinya 17.176 orang dan jumlah perempuannya ada 17.095 orang, sedangkan penduduk WNA jumlah laki-lakinya 41 orang dan jumlah perempuannya ada 25 orang untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel I
PENDUDUK KELURAHAN BENDUNGAN HILIR
MENURUT JENIS KELAMIN

UMUR	URAIAN						JUMLAH
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 4	1652	1605	3257	-	-	-	3257
5 - 9	1629	1594	3223	-	-	-	3223
10 - 14	1793	1927	3720	-	-	-	3720
15 - 19	1715	2313	4028	-	-	-	4028
20 - 24	2762	2268	5022	1	1	2	5024
25 - 29	1429	1445	2874	2	1	3	2703
30 - 34	1431	1267	2698	3	2	5	2703
35 - 39	1398	1293	2691	4	2	6	2697
40 - 44	1348	1235	2583	4	3	7	2590
45 - 49	1452	1277	2729	4	4	8	2737
50 - 54	341	466	807	6	3	9	816
55 - 59	128	274	402	6	2	8	169
60 - 64	75	86	161	5	3	8	169
65 - 69	9	29	38	3	2	5	43
70 - 74	7	14	21	2	2	4	25
75 dst	7	10	17	1	0	1	18
JUMLAH	17176	17095	34271	41	25	66	34337

Sumber : Laporan Kelurahan Bendungan Hilir Tahun 1992/1993.

Adapun kepadatan penduduk di tiap-tiap RW adalah sebagai berikut : di RW.01 jumlah penduduknya 4550 orang terdiri dari 2131 orang penduduk laki-laki dan 2391 penduduk perempuan, di RW 02 jumlah penduduknya 4221 orang terdiri dari 2137 penduduk laki-laki dan 2070 penduduk perempuan, di RW. 03 jumlah penduduknya 4335 orang terdiri dari 2188 penduduk laki laki dan 2134 penduduk perempuan, di RW 04 jumlah penduduknya 4617 orang terdiri dari 2314 penduduk laki-laki dan 2292 penduduk perempuan. di RW.05 jumlah penduduknya 4132 orang terdiri dari 2093 penduduk laki-laki dan 2039 penduduk perempuan, di RW. 06 jumlah penduduknya 4560 orang terdiri dari

2428 penduduk laki-laki dan 2132 penduduk perempuan, di RW. 07 jumlah penduduknya 4564 orang terdiri dari 2368 penduduk laki-laki dan 2196 penduduk perempuan, di RW.08 jumlah penduduk 3358 orang terdiri 1517 penduduk laki-laki dan 1841 penduduk perempuan. Supaya lebih jelas gambaran penduduk di tiap-tiap RW dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 2
JUMLAH PENDUDUK DI TIAP - TIAP RUKUN WARGA

RW	WNI			WNA			JUMLAH
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
01	2131	2391	4522	18	10	28	4450
02	2137	2070	4207	9	5	14	4221
03	2188	2134	4332	8	5	13	4335
04	2314	2292	4606	6	5	11	4617
05	2093	2093	4132	-	-	-	4132
06	2428	2132	4560	-	-	-	4560
07	2368	2196	4564	-	-	-	4564
08	1517	1841	3358	-	-	-	3358
JML	17176	11095	34271	41	25	66	3433

Sumber : Laporan Kelurahan Bendungan Hilir Tahun 1992/1993.

Dengan Bendungan Hilir seperti juga daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan bagian dari wilayah kota metropolitan memiliki mobilitas penduduk cukup tinggi. Dilihat dari bulan April sampai dengan bulan Desember 1992 anak-anak yang lahir di kelurahan Bendungan Hilir berjumlah 345 anak, terdiri dari 197 anak laki-laki dan 148 anak perempuan. Kemudian yang lahir pada bulan Januari sampai bulan Maret 1993 berjumlah 87 anak. Terdiri dari 41 Anak laki-laki dan 46 anak perempuan. Jadi jumlah anak yang lahir dalam satu tahun sebanyak 432 anak. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan sekaligus menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk. Selanjutnya bertambahnya penduduk disebabkan pula oleh penduduk yang datang untuk tinggal di Bendungan Hilir. Dalam jangka waktu satu tahun sejak bulan April 1992 sampai bulan Maret 1993 penduduk yang datang sebanyak 611 orang, terdiri dari 369 laki-laki dan 242 perempuan. Sebaliknya penduduk

yang pindah atau keluar dari Bendungan Hilir dalam jangka waktu satu tahun itu pula berjumlah 591 orang, terdiri dari 356 laki-laki dan 253 perempuan; serta yang mati dalam satu tahun tersebut sebanyak 122 orang, terdiri dari 76 laki-laki dan 46 perempuan. Jadi dengan demikian jika kita bandingkan antara penduduk yang datang dengan penduduk yang keluar, lebih banyak yang datang. Geraknya harus berpindahan penduduk kelurahan Bendungan Hilir tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3
MOBILITAS PENDUDUK
KELURAHAN BENDUNGAN HILIR

BULAN		LAHIR		DATANG		MATI		PINDAH	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
APRIL	1992	15	18	32	18	8	5	19	23
MEI	1992	19	20	33	17	7	2	39	25
JUNI	1992	28	23	41	20	5	5	28	28
JULI	1992	32	20	33	12	8	4	47	20
AGUSTUS	1992	27	11	40	15	4	5	53	11
SEPTEMBER	1992	14	17	31	20	6	1	38	40
OKTOBER	1922	22	13	36	23	7	3	27	10
NOPEMBER	1992	19	22	22	21	4	8	17	18
DESEMBER	1992	21	14	41	18	8	6	24	23
JANUARI	1993	12	16	29	42	5	1	35	19
PEBRUARI	1993	11	16	17	18	5	2	15	20
MARET	1993	18	14	14	18	9	4	24	16
JUMLAH		238	214	369	242	76	46	356	253

Sumber : laporan Kelurahan Bendungan Hilir Tahun 1992/1993

2.4. Perekonomian

Menurut keterangan Bapak Komarudin (Ketua LKMD Kelurahan Bendungan Hilir). Penduduk di lokasi penelitian ini banyak memilih profesinya sebagai pedagang. Mereka lebih senang memilih lapangan kerja dagang dibandingkan dengan bidang pekerjaan lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh latar belakang dari penduduk pendatang itu sendiri, yang kebanyakan mereka berasal dari daerah Sumatera dan orang-orang Tionghoa (Cina). Disam-

ping itu pula lokasi daerah ini sangat strategis, disana terdapat Pasar Tanah Abang yang dikenal sebagai tempat penjualan dan pembelian barang-barang grosiran sampai pedagang kaki lima juga ada. Selain itu sebagian penduduk lainnya yang berlatar belakang keturunan supir-supir pribadi pada jaman Belanda, mereka umumnya memilih bekerja di Swasta, terutama mereka yang pindah ke Bendungan Hilir karena tergusur dari kampung limo Sarinah. Berbeda dengan daerah Pejompongan, penduduknya kebanyakan menjadi pegawai negeri.

Penduduk yang berwiraswasta dalam artian usaha secara kecil-kecilan yakni sebagai pedagang dipasar tradisional, mereka melakukan kegiatannya di pasar yang tempatnya terletak dijalan Bendungan Hilir Raya dan Jalan Jenderal Sudirman. Pasar tradisional tersebut kemudian mengalami perubahan atau perbaikan-perbaikan artinya diadakan peremajaan pasar sekitar tahun tujuh puluhan. Pasar itu melayani konsumen yang datang dari sekitar Kecamatan Tanah Abang, sekitar kecamatan Setia Budi dan daerah Kebayoran Baru. Dan dapat melayani berbagai macam kebutuhan konsumen sperti yang terdapat dipasar-pasar pada umumnya di Jakarta. Selain Pasar Bendungan Hilir yang sudah permanen terdapat pula pasar yang sifatnya masih tradisional, pasar tersebut berlokasi disebelah selatan pasar Bendungan Hilir. Pasar tradisionil ini pada umunya melayani kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan. Kegiatan pasar tradisionil tersebut diatas biasanya dimulai sejak pukul 03.00 dini hari sampai sekitar pukul 08.00.

Kalau kita lihat secara keseluruhan, mata pencaharian penduduk kelurahan Bendungan Hilir beraneka ragam pekerjaannya yaitu : Ada bekerja sebagai pedagang yang terbanyak jumlahnya mencapai 2317 orang. Dari jumlah itu terdapat 1471 pedagang laki-laki dan 843 pedagang perempuan. Bekerja sebagai Karyawan Swasta sebanyak 5719 orang, terdiri dari 2799 Karyawan dan 2920 Karyawati. Bekerja sebagai pegawai Negeri sebanyak 5041 orang, terdiri dari 3371 Karyawan dan 1670 Karyawati. Bekerja sebagai anggota ABRI sejumlah 304 orang, terdiri dari 135 laki-laki dan 169 perempuan. Yang sudah purnabakti sebanyak 425 orang, terdiri dari 303 laki-laki dan 122 perempuan. Ada juga yang bekerja dibidang pertukangan sebanyak 713 orang laki-laki saja dan lain-lain. Adapun komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian hidup, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4
KOMPOSISI PENDUDUK
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

NO.	MATA PENCAHARIAN	LK	PR	JML
1	Pedagang	1474	843	2317
2	Karyawan Swasta	2799	2920	5719
3	Pegawai Negeri	3371	1670	5041
4	Anggota ABRI	135	169	304
5	Pensiunan	303	122	425
6	Pertukangan	713	-	713
7	Lain-lain *	835	647	1482

* Lain-lain yang dimaksudkan disini adalah buruh harian lepas, termasuk pelajar dan anak-anak.

Apabila kita perhatikan kehidupan ekonomi masyarakat di daerah penelitian dengan melihat tabel mata pencaharian penduduk tersebut di atas, maka dapat di perkirakan bahwa penduduk termasuk berpenghasilan menengah kebawah.

2.5. Pendidikan

Berdasarkan keterangan seorang warga di lokasi penelitian, bahwa sekitar tahun 1957 sarana pendidikan yang ada di Wilayah Tanah Abang adalah sekolah *vervolgesschool*, dan yang kemudian berubah menjadi sekolah Rakyat (SR). Lokasi sekolah tersebut berada di daerah Kuburan Karet. Selain SR itu berdiri pula sekolah yang bersifat keagamaan yang bernama Madrasah Haji Sidik, dan sekolah ini berlokasi di Bendungan Hilir. Disamping itu sekolah yang bernafaskan keagamaan juga adalah sekolah Muhamadiyah yang berlokasi di daerah Bendungan Udik. Dengan demikian sarana pendidikan di daerah ini masih jauh dari cukup, baru kemudian mulai sejak PJPT I sampai akhir PJPT I sarana dan prasarana pendidikan berangsur-angsur dibangun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945, dan selanjutnya pembangunan dibidang pendidikan ini akan terus ditingkatkan dalam PJPT II dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia, agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dalam era globalisasi. Kita lihat kemajuan yang telah dicapai dan kendala apa yang ada dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut, serta dampak pendidikan itu sendiri terhadap kehidupan sosial budaya keluarga akan

kami jelaskan dalam uraian bab-bab ini berikutnya.

Pada saat penelitian ini pertama kita melihat terlebih dahulu komposisi jumlah penduduk Bendungan Hilir menurut tingkat pendidikannya, dapat dibedakan sebagai berikut : penduduk yang tidak berpendikannya artinya penduduk yang tidak pernah memperoleh pendidikan artinya penduduk yang tidak pernah memperoleh pendidikan di bangku sekolah ada sejumlah 107 orang, penduduk yang tamat Sekolah Dasar terdapat sejumlah 134 orang, penduduk yang tamat Sekolah Menengah Pertama sejumlah 425 orang, penduduk yang tamat Sekolah Menengah Atas sejumlah 135 orang dan penduduk yang tamat Akademik/ Perguruan Tinggi (PT) sejumlah 74 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 5
PENDUDUK KELURAHAN BENDUNGAN HILIR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	LK	PR	JUMLAH
1.	Tidak sekolah	86	21	107
2.	Tidak tamat SD	-	-	-
3.	Tamat SD	42	92	134
4.	Tamat SMP	218	207	425
5.	Tamat SMA	53	82	135
6.	Tamat Akademi/PT	58	16	74
J U M L A H		457	418	875

Sumber : Laporan Kelurahan Bendungan hilir Tahun 1992/1993.

Fasilitas pendidikan berupa sekolah baik yang berstatus sekolah negeri maupun yang masih berstatus sekolah Swasta. Mulai dari tingkat Tamat Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) telah ada tersedia dibangun di kelurahan Bendungan Hilir. Sarana pendidikan yang tersedia, khususnya untuk sekolah dasar sudah cukup memadai oleh karena satu gedung dipakai untuk sekolah pagi dan sore. Sarana pendidikan formal yang tersedia dapat dilihat secara lebih terperinci dalam tabel 4 di samping ini :

TABEL 6
SARANA PENDIDIKAN FORMAL NASIONAL

TINGKAT	STATUS	JUMLAH GEDUNG	JUMLAH SEKOLAH	KET
TK	Swasta	6	6	
SD	Negeri	6	12	
	Inpres	1	2	
	Subsidi	1	1	
	Swasta	4	4	
SLTP	Negeri	1	12	
	Swasta	4	5	
SLTA	Negeri	1	1	
	Swasta	4	4	
JUMLAH	Negeri	8	25	
	Inpres	1	1	
	Subsidi	1	1	
	Swasta	18	19	

Sumber : Laporan Kelurahan Bendungan Hilir Tahun 1992/1993.

Tabel 7
SARANA PENDIDIKAN FORMAL
YANG BERSIFAT KEAGAMAAN

NO.	TINGKAT	STATUS	JUMLAH GEDUNG	JUMLAH SEKOLAH
1.	MADRASAH IBTIDAIYAH	Swasta	3	3
2.	MADRASAH STANAWIYAH	Swasta	1	1
	JUMLAH		4	4

Sumber : Laporan Kelurahan Bendungan Hilir Tahun 1992/1993

BAB III

KENDALA-KENDALA DALAM PENGEMBANGAN POLA PENDIDIKAN NASIONAL

3.1. Pendidikan Sekolah Mengancam Ketaqwaan.

Adanya anggapan bahwa sekolah merupakan ancaman bagi peserta didik dalam menuju ketaqwaan beragama, merupakan asumsi sementara penduduk. Pada waktu itu penduduk cenderung lebih senang memasukkan anaknya yang masih balita/usia dini ke pengajian. Usia dini dimaksud umur tiga atau empat tahun.

Mereka belajar mengaji di mesjid taqlim yang terdekat. Didalam pengajian ini anak diharapkan dapat memperoleh pelajaran menulis dan membaca huruf Arab, setelah tamat nanti. Alasannya karena huruf itu yang terdapat dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci Allquran. Juga yang tertulis dalam hadist.

Mereka mendapat pelajaran menulis dan membaca dari guru mengaji yang disebut uzstad memakai dasar tulisan Arab. Yaitu tulisan huruf dan angka yang tertulis pada kitab Allquran, Hadist dan kitab-kitab yang sejenis lainnya.

Setelah mereka dapat membaca dan menulis dengan tulisan dan huruf Arab, diharapkan mereka dapat dengan mudah membaca, mempelajari ayat-ayat yang paling mudah dan sederhana yang terdapat dalam Allquran. Kemudian setelah lancar membaca dan menulis, diberikan pelajaran norma-norma perilaku yang baik seperti yang terdapat dalam ajaran agama Islam pada umumnya, yang nantinya akan dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, dimasyarakat dan selanjutnya dalam kehidupan berbangsa dan berne-gara.

Dari pengajian seperti ini nantinya setelah tamat atau yang lazim pada waktu itu disebut chatam, dapat melanjutkan kesekolah Islam tingkat sekolah dasar. Yang dikenal dengan penyebutan Ibtidahnya dan selanjutnya dapat keseko-

lah yang lebih tinggi lagi, yaitu sekolah yang setingkat dengan sekolah lanjutan tingkat pertama yang disebut Tsanawiyah.

Tetapi pada umumnya setelah mereka tamat dari masjid taqlim atau pengajian dan melanjutkan kesekolah Islam tingkat sekolah dasar, mereka lebih senang melanjutkan ke pondok pesantren.

Di pondok pesantren mereka diberikan pelajaran pokok ilmu keagamaan. Selain ilmu keagamaan mereka juga diberikan beberapa mata pelajaran umum seperti yang terdapat pada kurikulum sekolah umum, walaupun hanya sebagian kecil. Misalnya saja pelajaran berhitung, pelajaran sejarah umum dan Indonesia atau sejarah nasional, pelajaran ilmu bumi, menggambar, pekerjaan tangan dan lain-lain sebagainya.

Ketika itu di wilayah ini sudah banyak disebut dan dikenal penduduk beberapa nama pondok pesantren, terutama yang terdapat di pulau Jawa. Misalnya saja pondok pesantren Gontor, Tebu Ireng, All Kamal dan lain-lain sebagainya. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa, pelajaran di pondok pesantren sama atau disamakan dengan mata pelajaran yang terdapat disekolah umum dan kejuruan yang bersifat nasional, tetapi kenyataan yang ada di lapangan tidak demikian. Hal ini terjadi karena perbedaan kurikulum.

Karena perbedaan kurikulum, tujuan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan ini, maka hasilnya pun cenderung berbeda. Kurikulum sekolah pendidikan keagamaan memiliki bobot dibidang ilmu keagamaan hampir mencapai delapan puluh persen jika dibandingkan bobot yang ada pada sekolah umum.

Keluaran dari pondok pesantren tingkat sekolah menengah atas yang disebut Aliyah, akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang relevan misalnya saja di Institut Agama Islam Negeri (Nasional) atau Di Institut Ilmu Alquran atau yang sejenis lainnya.

Keluaran dari Perguruan Tinggi ini sebaiknya, jika bekerja dilembaga yang memiliki hubungan langsung dengan keilmuan misalnya departemen agama. Untuk di lembaga lain kurang relevan. Jika ada yang diterima di salah satu lembaga atau instansi, bidang yang relevan terbatas misalnya dibidang pembinaan rohani.

Kendala lain yang di hadapi dalam aplikasi pendidikan adalah sebagai berikut; Bagi masyarakat penyetaraan, pelaksanaan tutorial pada awalnya tidak ditemukan hambatan. Tetapi setelah memasuki semester tiga dan empat mulai tampak adanya gejala dan mulai ditemukan kejadian-kejadian atau semacam kasus dalam keluarga. Adanya hubungan antara suami dan istri yang cenderung

kurang harmonis. Hubungan antara suami, istri dan anak-anak juga kurang manis atau kurang baik.

Disamping kasus tersebut diatas, ada lagi satu kejadian yang agak menarik untuk di kaji dan direnungkan oleh pakar di bidang pendidikan dan pakar di bidang psikologi atau ilmu jiwa. Terjadi di wilayah Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Satu keluarga, suami dan istri kedua-duanya bekerja. Suami bekerja di perusahaan swasta di luar kota yaitu di kota Cilegon, Banten jawa Barat. Istri seorang guru sekolah dasar di Jakarta dan masuk menjadi mahasiswa penyeteraan diploma dua .Ketika itu sudah memasuki semester empat. Suami pulang ke Jakarta tiap satu Minggu satu kali, yaitu pada hari Sabtu sore dan pada hari minggu sore kembali cilegon, sebab pada hari senin pagi harus sudah masuk kantor. Istri pada hari Minggu pagi pergi untuk pelaksanaan tutorial sampai sekitar pukul empat sore. Demikian dilakukan setiap hari Minggu secara terus menerus. Pada Minggu pertama, kedua dan ketiga tidak terjadi apa-apa, keadaan rumah tangga tenang dan tentram, seperti minggu sebelumnya.

Pada Minggu keempat situasinya lain. Suami pada satu kesempatan tiba-tiba emosinya berperan dan suami marah besar. Ia mengancam istrinya dan berkata, jika keadaan seperti ini terus menerus terjadi, setiap hari minggu ibu tidak dirumah, sejak pagi sampai sore. Lebih baik bapak berhenti tidak usah lagi bekerja sebab kasihan anak-anak. Itulah ancaman seorang suami dan juga seorang bapak atau ayah dari beberapa anak. Menghadapi hal seperti ini istri tidak lansung menjawab dan memberikan keputusan, tetapi pada esok harinya istri memberitahukan kejadian itu kepada atasannya yaitu kepala sekolah. Selanjutnya kepala sekolah melanjutkan masalah ini kepada penilik sekolah dan akhirnya sampai ke Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Contoh tersebut diatas merupakan salah satu kejadian yang sudah pasti bukan satu-satunya kejadian yang ada di masyarakat penyeteraan, yang banyak tersebar dilima wilayah kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kendala umum terjadi misalnya saja, semakin terasa sepi gereja dikunjungi umatnya, karena ternyata pengunjungnya sebagian besar adalah keluarga penyeteraan. Mereka tidak sempat lagi pergi ke gereja, karena bertepatan waktunya untuk mengikuti pelaksanaan tutorial. jika mereka pergi ke gereja berarti tidak hadir di tempat tutorial. Akibatnya waktu tatap muka kurang, dan jika hal seperti terjadi dua atau tiga kali secara terus menerus, kehadiran kurang mencapai tujuh puluh lima persen. Tidak boleh ikut ujian. Hal ini merupakan penyebab, setidaknya

tidaknya salah satu **penyebab** merosotnya kualitas mahasiswa penyetaraan diploma dua di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penyebab lain yaitu **hampir** seluruh guru Sekolah Dasar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bertugas mengajar tidak cukup di satu sekolah. Mereka mengajar mulai pukul tujuh pagi di satu sekolah sampai pukul dua belas tiga puluh menit. Siangnya mereka mengajar biasanya disekolah swasta mulai dari pukul tiga belas sampai pukul tujuh belas tiga puluh menit. Tugas mengajar ini mereka lakukan untuk menambah kebutuhan ekonomi rumah tangga. Alasan mereka karena perolehan gaji di negeri tidak mencukupi jika dibandingkan dengan kebutuhan pokok untuk hidup dikota metropolitan yang sangat sederhana.

Jika hal seperti ini terjadi secara terus menerus artinya setiap hari mereka baru tiba di rumah sekitar pukul sembilan belas atau pukul tujuh malam. Malamnya digunakan untuk menyiapkan program mengajar esoknya, dan ada waktu sedikit untuk melayani keluarga. Artinya sudah tidak ada lagi waktu untuk membuka dan mempelajari modul. Akibatnya pada waktu dilaksanakan tutorial kondisi badan kurang prima, modul tidak sempat dibaca dirumah, ini artinya pelaksanaan tutorial tidak dapat berjalan dengan baik.

Dari pengaruh situasi dan kondisi seperti yang diutarakan diatas ditemukan hasil dari pelaksanaan tutorial yang diwujudkan dalam bentuk ujian semester merosot tajam. Kejadian seperti ini siapa yang salah, , dan siapa yang dipersalahkan, mari kita renungkan bersama.

Dampaknya terjadi pada peserta didik disekolah Dasar diwilayah tempat mereka mengajar. Pengaruh dari kejadian seperti tersebut di atas akan menjalar di tempat mereka mengajar. Kegairahan untuk meningkatkan minat belajar pada anak didiknya cenderung menurun. Yang terjadi bahkan peserta didik akan lebih sering berikan pekerjaan atau tugas, tetapi tidak sempat diperiksa. Sebab waktu yang ada dipergunakan untuk membaca modul. Kondisi seperti ini akan berakibat pada peserta didik dan dapat di pastikan minat dan semangat belajar mereka makin menurun, karena peserta didik merasa kurang mendapat perhatian dari guru.

Penyebab lain merosot kualitas penyetaraan diploma dua juga disebabkan karena mahasiswa akhir-akhir ini diambil dari guru kelas satu dan dua. **Sehari-hari** mereka menekuni pelajaran yang relatif memerlukan pola pikir yang sangat sederhana.

3.2. Melunturnya Ketaatan Peserta didik Terhadap Adat istiadat dan orang tua.

Untuk menemui penduduk asli Betawi di wilayah Kelurahan Bendungan Hilir Sulit dewasa ini. Artinya sebagian besar penduduk yang berdomisili di wilayah ini adalah pendatang atau perantau. Yang dimaksud perantau adalah penduduk yang berasal dari daerah luar Jakarta atau pulau lain di Indonesia, dan berusaha menetap di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mereka berasal dari berbagai sukudiantarany; dari pulau Sumatra ialah, suku bangsa Aceh, Tapanuli, Minangkabau, Riau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung dan lain-lain sebagainya. Dari pulau Kalimantan ialah, suku bangsa Dayak, Banjarmasin, Balikpapan dan lain-lain sebagainya. Dari Pulau Sulawesi ialah, suku bangsa Gorontalo Manado, Toraja, Bugis, Makasar dan lain-lain sebagainya. Dari pulau Irian Jaya antara lain suku bangsa Lembah Balim, dari kepulauan Maluku suku bangsa Ambon, suku dari kepulauan Halmahera, Ternate Dan Tidore dan lain-lain sebagainya. Dan masih banyak lagi dari pulau-pulau yang ada di sekitar Wawasan nusantara.

Perantauan yang termasuk warga negara Indonesia keturunan asing antara lain ; bangsa tionghoa atau cina baik yang berasal dari dataran Tiongkok dan/ atau yang berasal dari pulau Formosa ibukotanya Taiwan atau yang berasal dari Hongkong, serta bangsa Arab.

Selain seperti yang tersebut diatas, ada yang di sebut pedatang yang disebut kelompok urban. Berasal dari kata urbanisasi. Artinya pendatang yang berasal dari pedesaan masuk ke wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tujuan utamanya untuk mencari kerja. Hal ini terjadi karena ditempat asalnya tidak terbuka Lapangan pekerjaan dan mereka beranggapan bahwa mencari pekerjaan di Ibukota negara mudah. Dapat juga diartikan perpindahan penduduk dari desa ke kota, biasanya bersifat musiman. Suku bangsa yang tergolong dalam kelompok ini adalah mereka yang datang dari suku bangsa sunda / tanah pasundan Jawa Barat. Juga ada yang berasal dari daerah- daerah di jawa dan pulau Madura yaitu suku bangsa Jawa dan suku bangsa Madura.

Mereka menempati dan menetap menjadi penduduk di wilayah ini secara turun temurun melalui segala macam usaha dan upaya agar pemerintah dapat memberi izin untuk menetap di wilayah ini. Mereka sebagian mempunyai mata pencaharian dengan cara berdagang, buruh dan berwiraswasta/usaha mandiri.

Usaha mereka pernah berhasil baik di wilayah ini, hal ini dapat kita lihat bekas-bekas kejayaannya di sini yang disebut Koperasi pedagang Batik Djakarta (KPBD), sampai sekarang ada lembaga pendidikan yang bernama

KPBD (sekolah dasar dan sekolah menengah) dan ada gang yang di beri nama oleh penduduk Gang Batik.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat serta meningkatkan pengabdian kepada pemerintah, bangsa dan negara dibangun sekolah swasta yang diberinama Sekolah Dasar dan sekolah Menengah Tingkat Pertama, Koperasi Batik Djakarta. Sekolah ini pertama, Koperasi Pedagang Batik Djakarta. Sekolah ini sampai sekarang masih ada dan berjalan dengan baik.

Pengusaha-pengusaha dan para pedagang batik pada umumnya dilakukan oleh warga negara Indonesia keturunan asing yaitu cina dan keturunan Arab, sedang karyawannya serta buruhnya kebanyakan warga negara asli.

Keturunan mereka bertempat tinggal membaaur dengan warga negara Indonesia asli Betawi daan perantauan lainnya/ pendatang, dalam pergaulan saling berpengaruh, bersosialisasi, terjadi proses pembauran sampai pada asimilasi. Puncak dari proses pergaulan ini akan berakibat pada perkawinan campuran. Jadi asimilasi artinya perkawinan campuran , antara warga negara Indonesia asli baik, dari suku bangsa Betawi atau pendatang dengan warga negara Indonesia keturunan asing Tionghoa atau Arab, atau sebaliknya.

Proses pembauran terjadi terbatas pada masalah pergaulan, misalnya saling mempelajari kebudayaan atau tukar menukar pengalaman dalam usaha dan berwira swasta. sosialisasi yang terjadi antara penduduk asli Betawi, pendatang dengan penduduk keturunan Tionghoa atau Cina sangat berpengaruh terhadap perilaku/tingkah laku dalam kehidupan sosial budaya mereka.

Pengaruh perkawinan campuran antara penduduk asli Betawi yang mempunyai landasan agama Islam kuat, kita temukan wanita atau pria warga negara Indonesia keturunan Cina yang mulanya beragama non Islam kini rela masuk agama Islam. Pengaruh yang terdapat dalam kebudayaan, kita temukan dalam seni tari coked, seni tari topeng, seni tari lenong dan lain-lain sebagainya. Pada awalnya mereka sangat fanatik dalam agama, tetapi lambat laun karena proses asimilasi, berakibat adat istiadat yang sudah melekat sejak lama sukar di pertahankan keberadaanya. Upacara perkawinan yang unik dan memiliki nilai seni yang cukup tinggi itu, kini diganti dengan tatacara adat perkawinan dari tanah asalnya masing-masing atau ditukar dengan cara modern, yaitu tatacara perkawinan gaya Eropa.

Pada tahun seribu sembilan ratus enam puluhan, masuh dapat kita temukan upacara Gunting rambut orok (upacara potong rambut bayi) asli Betawi.

Dalam upacara ini biasanya diiringi musik klasik irama timur tengah (Arab) yang diberi nama robana (alat musik sejenis tambur agak pipih). Diselingi pembacaan salawat nabi, pembacaan ayat-ayat suci Allquran yang mengagungkan, mengakbarkan Nabi Muhamad SAW, sebagai utusan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kini upacara seperti ini diwilayah Kelurahan Bendungan Hilir sudah tidak dapat kita temukan lagi. Upacara seperti ini sudah di ganti dengan tata caranya masing-masing dari para pendatang, disesuaikan dengan perilaku / tingkah laku, adat istiadat di tanah leluhurnya.

Kepatuhan terhadap orang tua meluturnya dalam artian, mereka sekarang sudah berlainan pendapat, perbedaan persepsi tentang sebagaimana sebaiknya cara mencari sumber penghidupan dalam menyongsong hari depan mereka. Hal ini banyak terjadi bagi mereka yang sejak kecil bergaul membaaur dengan penduduk pendatang atau dengan warga negara Indonesia keturunan asing cina. Pengaruh yang datang dari warga negara Indonesia keturunan asing yakni orang Arab, di wilayah ini sangat kecil dan bahkan sekarang hanya tinggal satu yaitu Madrasah Haji Sidik.

Demikian pula bagi penduduk asal perantauan/pendatang kepatuhan anak terhadap orang tua juga turut meluntur. orang tua yang masih ingin mempertahankan adat istiadat, perilaku yang mereka bawa dari tempat kelahirannya juga mengalami erosi, dan bahkan ada yang sama sekali tidak ada lagi mau melaksanakan perilaku itu. Mereka yang memiliki pendidikan tinggi justru secara terang-terangan meninggalkan adat istiadat itu. mereka menggantikannya adat istiadat itu dengan perilaku yang lebih praktis, sederhana dan memerlukan biaya tidak banyak.

3.3. Pandangan Sementara Tokoh Masyarakat Tentang Pendidikan Sekolah

Diharamkan Oleh Masyarakat Betawi, sehingga melahirkan Orang Betawi Gedongan yang berpendidikan. Hal seperti ini terjadi sekitar tahun seribu sembilan ratus enam puluhan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kemampuan, yaitu dapat tidaknya anak-anak pada waktu itu untuk melanjutkan sekolah di sekolah lanjutan atau di perguruan tinggi ini semua didasarkan pada kemampuan orang tua dalam menyediakan dana untuk membiayai sekolah anaknya. Jika orang tua memiliki kemampuan keinginan atau minat dan kemampun dana atau keuangan untuk membiayai anaknya, kini timbul satu pertanyaan lagi apakah anak itu mampu otaknya untuk melanjutkan sekolah / belajar di perguruan tinggi. Satu kepastian yang dimiliki orang tua bahwa, anaknya akan berhenti dalam menuntut ilmu penge.ahuan, jika ia sudah mampu mencari nafkah sendiri dan sudah mampu berumah tangga.

Sementara itu orang tua masih memiliki anggapan bahwa, anak setelah tamat/ chatam membaca dan menulis ayat-ayat suci Allquran, tamat sekolah rakyat atau sekolah dasar dan sanggup dan mampu mencari nafkah serta mampu berumah tangga, tugas dan berkewajiban orang tua terhadap anaknya telah berakhir.

Jika anak ini nanti terjun kemasyarakat, bekerja dan berumah tangga, dapat ditampung untuk bekerja di tempat pembatikan atau dilokasi ditempat usaha lain, diantaranya usaha di bidang jahit menjahit atau konpeksi. Jika dua macam usaha ini dianggap kurang atau tidak cocok, mereka akan mencari tempat pekerjaan yang lebih cocok dengan selera dan bakatnya di perusahaan kerajinan membuat sepatu.

Tenaga kerja semacam ini akan diperkerjakan terus menerus sampai mereka jenuh dan pindah ketempat lain. Kelompok tenaga kerja seperti ini terus bekerja meskipun tidak mendapat kemajuan dan perkembangan untuk menuju kepada tingkat ketrampilan yang lebih baik, ketrampilan dibidang ilmu pengetahuan, ketrampilan di bidang ilmu pengetahuan, ketrampilan dibidang ilmu pengetahuan, ketrampilan dibidang teknologi serta ketrampilan - ketrampilan di bidang lainnya.

Hambatan yang terjadi disini disebabkan karena tenaga kerja seperti ini hanya tamat dari sekolah dasar, sehingga pola pikir dan daya kreatifitasnya sangat terbatas.

Sementara itu penduduk banyak berpendapat bahwa, jika anak disekolahkan terlalu tinggi sampai di perguruan tinggi, seperti di Universitas atau tingkat Akademi yang biasanya dimiliki oleh sinyo dan noni Belanda atau bangsa Eropa lainnya, anak akan menjadi berani, bersikap kurang terhormat terhadap ayah, ibu serta terhadap saudara lainnya. Hal seperti ini merupakan suatu perilaku yang kurang baik dan bahkan tidak terpuji. Bahkan menurut ajaran agama Islam termasuk yang diharamkan.

Anak yang dimaksudkan kesekolah seperti yang disebutkan diatas menjadi berani menentang orang tua, menjadi tidak patuh dan tidak taat terhadap orang tua dan nasehat orang tua, bahkan menjadi anak yang sombong, menjadi congkak dan takabur, serta menjadi penentang orang tua dan gurunya. Akhirnya orang tua berpendapat bahwa, jika anak dari keluarga asli Betawi didorong oleh kemauan orang tua atau kemauan anak itu sendiri masuk sekolah, jika awal itu tamat kelak akan membawa laknat dan bencana bagi keluarga.

Untuk menghindarkan agar hal-hal seperti tersebut diatas, maka orang tua mereka berpendapat anak tidak perlu di sekolahkan terlalu tinggi. Anak diharamkan menuntut ilmu pengetahuan melebihi dari tingkat sekolah dasar.

Cukup mereka berbekal dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengajian dan sekolah dasar, kemudian bekerja dan berumah tangga. Sesudah tahun seribu sembilan ratus enam puluhan tidak ada lagi penduduk berpendapat mengharamkan pendidikan sekolah bagi anak-anaknya di Kelurahan Bendungan Hilir maupun di seluruh Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3.4. Keengganan Orang Tua Mengirim Anaknyanya Ke Sekolah.

Tantangan tentang adanya orang tua yang tidak mau mengirimkan anak-anaknya ke sekolah terjadi sekitar tahun seribu sembilan ratus lima puluhan. Hal ini terjadi karena keadaan dan kondisi kehidupan masyarakat waktu itu sangat sulit. Artinya masyarakat atau rakyat berada dalam kondisi miskin. Tidak mampu memperoleh atau memiliki bahan pokok untuk keperluan hidup sehari-hari. Selain bahan pokok itu sukar di dapat dipasaran, masyarakat tidak mampu membelinya.

Untuk mempertahankan hidup, membebaskan diri dari kelaparan dirasakan oleh masyarakat sangat sukar. Kehidupan yang serba sulit, sukar mendapatkan uang dan sulit mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok, untuk konsumsi masyarakat.

Ketika itu keberadaan sekolah dianggap penduduk sebagai suatu tantangan atau suatu hambatan, suatu kendala bagi keluarga, karena tenaga mereka sangat diperlukan untuk membantu pekerjaan orang tua. mereka ada yang membantu usaha dagang menjual buah-buahan, sayur mayur, alat-alat rumah tangga di pasar. Ada juga diantara mereka yang membantu orang tua bekerja di sawah atau di kebun untuk mengurus tanaman padi dan tanaman buah-buahan.

Dibidang usaha mereka membantu orang tua untuk melayani pekerjaan pembuatan kerajinan, pembuatan sepatu/usaha dibidang pekerjaan lain nya. Bahkan ada juga orang tua yang merelakan anaknya yang masih kecil, masih usia dibawah sepuluh tahun (belum cukup umur untuk kerja) itu kerja di bengkel / pabrik pembatikan, di pabrik bahan baku atau konpeksi (rumah jahitn/ tempat menjahit secara masal) dan lain-lain sebagainya.

Faktor-faktor yang mendorong mereka para orang tua berbuat seperti itu terhadap anak-anaknya, diantaranya ialah kemiskinan dan kondisi masyarakat waktu itu.

Bagi keluarga yang mampu atau mengirim anak-anaknya ke Masjid Taqlim yang ketika itu dikenal dengan nama pengajian. Keluarga tidak mengirim anak-anaknya itu ke sekolah, karena orang tua mempunyai anggapan

bahwa pendidikan sekolah tidak cocok untuk belajar anak-anaknya itu. Pengalaman yang dipetik orang tua, jika anaknya dikirim ke sekolah, anak akan menjadi tidak patuh, tidak patuh terhadap adat istiadat leluhur dan tidak patuh terhadap tuntunan hidup yang di ajarkan oleh ayat-ayat Allquran dan Hadits.

Pendidikan sekolah hanya cocok untuk orang-orang penjajah seperti untuk orang Belanda dan untuk orang Eropa lainnya. Pendidikan sekolah hanya cocok untuk orang Cina, orang perantau atau pendatang. Sekolah bukan tempat orang asli Betawi belajar. Penduduk asli Betawi hanya cocok belajar mengaji atau bersekolah di sekolah yang bernafaskan agama Islam.

Tempat yang paling cocok untuk belajar anak-anak Betawi ialah di Masjid Taqlim atau pengajian. Melalui lembaga ini anak-anak di gembeng jasmani dan rohaninya untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pengertian-pengertian tuntunan hidup yang di ambil dari ajaran kitab suci Allquran dan ajaran kitab Hadits. Diberikan ajaran berupa tuntunan yang dijabarkan berupa macam-macam norma agama diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan dalam yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Diberikan norma-norma agama yang menjadi pedoman atau tuntunan manusia dunia, dan tutunan untuk bakal manusia telah mati di dalam alam akhirat.

Adanya pola pikir yang demikian sederhana, orang tua tidak terlalu banyak mengharap dari anak-anaknya untuk membalas budi atau berbakti kepada orang tua setelah dewasa kelak. Harapan orang tua pada waktu itu pada umumnya tertuju pada anak-anaknya, agar dikaruniai kehidupan yang tenteram, menjadi keluarga yang saleh, rajin mencari nafkah dan tidak melupakan melaksanakan perintahNya dan meninggalkan semua laranganNya. Dan jika anak sampai memperoleh jodoh, pandangannya tidak jauh berbeda seperti yang dimiliki anaknya itu. Ilmu agama yang telah dimiliki anaknya itu dapat ditambah dengan memasukkannya ke Sekolah Rakyat. Hal seperti ini dilakukan oleh orang tua yang memiliki pandangan dan pola pikir seperti tersebut diatas, dapat dihitung dengan jari. artinya sangat sedikit.

Anak yang sudah chatam dari pengajian, jika orang tuanya mampu dan kaya diupayakan untuk berdagang atau sementara mambantu usaha dagang yang dimiliki orang tuanya. Apabila nanti anak itu dianggap oleh orang tuanya sudah dapat bertanggung jawab, dan dianggap benar-benar sudah dewasa, sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengurus usaha dagang yang dimiliki orang tua. Untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan lancar dan baik, begitu pula tertib anaknya dapat menjalankan roda perusahaan dengan lancar, anaknya segera dikawinkan atau dinikahkan.

Orangtua pada umumnya tidak ada upaya dan niat, sekalipun mereka termasuk penduduk yang kaya, untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang lebih tinggi dari Sekolah Rakyat. Sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi yang diprogramkan untuk penduduk Betawi, yang berkewarga negaran Indonesia keturunan asing, diantaranya bangsa Eropa yaitu bangsa Belanda dan lain-lain sebagainya. Juga Warga negara Indonesia keturunan Jepang, dan penduduk Indonesia yang tidak senang pada ajaran agama Islam.

Anak yang disekolahkan di pendidikan sekolah yang bukan berdasar agama Islam nantinya akan menjadi anak-anak yang tidak setia dan patuh. Tidak setia dan patuh kepada orang tua, serta tidak akan menjadi anak yang saleh, taat memegang prinsip dalam melaksanakan tuntunan Islam.

3.5. Kegiatan Belajar Mengajar dan Kondisi Sekelilingnya.

Hasil kuesioner yang di jawab melalui responden yang terdiri dari mahasiswa penyetaraan diploma dua guru Sekolah Dasar semester lima dan enam pada tahun 1993, di Wilayah Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Walikotamadya Jakarta Pusat adalah sebagai berikut ;

- 3.5.1. Kendala yang dihadapi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa antara lain ; Belum meratanya kualitas pendidik yang dilaksanakan pemerintah. Tidak seluruh orangtua memiliki kepedulian partisipasi terhadap sekolah, dan bahkan terhadap anaknya sendiri. Minat belajar peserta didik yang kurang, disebabkan dominannya pengaruh lingkungan, terutama adanya siaran dari berbagai Televisi baik milik pemerintah maupun milik swasta. Biaya pendidikan yang relatif mahal/tinggi, tidak dapat di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Peralatan sekolah termasuk alat peraga dan laboratorium, yang merupakan alat pendukung dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sangat kurang. Akibat kurang adanya sarana pendukung tersebut diatas, dapat melahirkan pelaksanaan proses belajar mengajar yang Verbalisme.
- 3.5.2. Kurikulum pendidikan sekolah yang tersedia belum seluruhnya mengacu pada lapangan pekerjaan yang telah ada di masyarakat, sehingga keluaran dari pendidikan sekolah itu mendapat hambatan dalam mendapatkan pekerjaan di masyarakat.

3.5.3. Yang menghambat proses pendidikan sekolah, sehingga tujuan pendidikan sekolah tidak tercapai, karena kurang adanya ketrampilan yang dimiliki pendidik, akibat pengaruh globalisasi yang lebih cepat dari pada percepatan pembangunan di bidang pendidikan.

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN SEKOLAH

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun '89 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4.1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, mengatur tentang sistem Pendidikan Nasional terdiri dari 20 bab yang meliputi hal-hal seperti dibawah ini :

Bab.I. Ketentuan Umum berisi 1 pasal membicarakan mengenai 12 masalah yaitu :

- 1.1.1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.
- 1.1.2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
- 1.1.3. Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.
- 1.1.4. Jenis Pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya.
- 1.1.5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran.
- 1.1.6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 1.1.7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 1.1.8. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing,

mengajar dan/atau melatih peserta didik.

1.1.9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

1.1.10. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penampung pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama.

1.1.11. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.

1.1.12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional.

Bab 2. Dasar, Fungsi dan Tujuan berisi pasal membicarakan mengenai masalah ialah ;

2.2.2. Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

2.2.3. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

2.2.4. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan keluarga.

Bab.3. Hak Warga Negara untuk memperoleh pendidikan berisi 4 (empat) pasal membicarakan mengenai empat masalah ialah ;

3.3.5. Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

3.3.6. Setiap Warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar.

3.3.7. Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku,ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan,

3.3.8.1. Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/ atau mental berhak

- memperoleh pendidikan luar biasa.
- 3.3.8.2. Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.
 - 3.3.8.3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
- Bab.4. Satuan, jalur dan jenis pendidikan berisi 3(tiga) pasal membicarakan mengenai tiga masalah ialah ;
- 4.4.9.1. Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar - mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.
 - 4.4.9.2. Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan.
 - 4.4.9.3. Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus dan satuan pendidikan yang sejenis.
 - 4.4.10.1. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
 - 4.4.10.2. Jalur Pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan.
 - 4.4.10.3. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.
 - 4.4.10.4. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan ketrampilan.
 - 4.4.10.5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang tidak menyangkut ketentuan sebagaimana pada ayat 4 (empat) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - 4.4.11.1. Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar sekolah biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
 - 4.4.11.2. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan peserta didik dengan pengkhususan yang di wujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan.
 - 4.4.11.3. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
 - 4.4.11.4. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus diselenggarakan

untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik/ atau mental.

- 4.4.11.5. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
- 4.4.11.6. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
- 4.4.11.7. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
- 4.4.11.8. Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- 4.4.11.9. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) sampai dengan ayat 8 (delapan) di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bab.5. Jenjang Pendidikan.

Bagian kesatuan Umum berisi satu pasal membicarakan mengenai masalah ;

- 5.5.12.1. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- 5.5.12.2. Selain jenjang pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat satu dapat diselenggarakan pendidikan sekolah.
- 5.5.12.3. Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat dua ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian kedua, Pendidikan Dasar.

- 5.5.13.1. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan siap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang di perlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
- 5.5.13.2. Syarat-syarat dan tata cara pendirian bentuk satuan, lama pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 5.5.14.1. Warga negara yang berumur enam tahun berhak mengikuti pendidikan

dasar.

- 5.5.14.2. Warga negara yang berumur tujuh tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat.
- 5.5.14.3. Pelaksanaan Wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga, Pendidikan Menengah,

- 5.5.15.1. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja dan pendidikan tinggi.
- 5.5.15.2. pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan dan pendidikan agama.
- 5.5.15.3. Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan berhak melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- 5.5.15.4. pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat satu dan dua ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat, Pendidikan Tinggi.

- 5.5.16.1. Pendidikan tinggi merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik, menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian.
- 5.5.16.2. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau Universitas.
- 5.5.16.3. Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
- 5.5.16.4. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- 5.5.16.5. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan / atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.
- 5.5.16.6. Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/ atau profesional

dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.

- 5.5.16.7. Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu
- 5.5.16.8. Syarat-syarat dan tata cara pendirian struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 5.5.17.1. Pendidikan tinggi atas pendidikan akademi dan pendidikan profesional.
- 5.5.17.2. Sekolah tinggi, institut, dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan / atau profesional.
- 5.5.17.3. Akademi dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.
- 5.5.18.1. Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana magister, doktor dan sebutan profesional.
- 5.5.18.2. Gelar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas.
- 5.5.18.3. Gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi oleh perguruan tinggi, institut, dan universitas yang memenuhi persyaratan.
- 5.5.18.4. Sebutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
- 5.5.18.5. Institut dan Universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada tokoh -tokoh yang dianggap perlu memperoleh penghargaan yang amat tinggi berkenan dengan jasa-jasa luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi kemasyarakatan ataupun kebudayaan.
- 5.5.18.6. Jenis gelar dan sebutan, syarat - syarat dan tata cara pemberian, perlindungan dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 5.5.19.1. Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan.
- 5.5.19.2. Penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk singkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.5. 20. Penggunaan gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri harus di gunakan dalam bentuk asli sebagaimana di peroleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan, secara lengkap dalam bentuk singkatan.

- 5.5.21.1. Pada Universitas, institut dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor.
- 5.5.21.2. Pengangkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasarkan atas kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu.
- 5.5.21.3. Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru besar atau profesor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 5.5.22.1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- 5.5.22.2. Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengolahan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.
- 5.5.22.3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bab. 6. Peserta Didik.

- 6.6.23.1. Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik.
- 6.6.23.2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Menteri.

Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- 6.6.24.1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- 6.6.24.2. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan dari maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
- 6.6.24.3. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- 6.6.24.4. Pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;
- 6.6.24.5. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- 6.6.24.6. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
- 6.6.24.7. Mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.
- 6.6.25.1. Setiap peserta didik berkewajiban untuk;

1.1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali

bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

1.2. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

1.3. menghormati tenaga kependidikan;

1.4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan yang bersangkutan.

6.6.25.2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Menteri.

6.6.26.3. Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan cara belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing.

Bab. 7 . Tenaga Kependidikan.

7.7.27.1. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggaraan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

7.7.27.2. Tenaga Kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan. penilik, pengawas, peneliti dan pengembang pendidikan pustakawan, laporan, dan teknisi sumber belajar.

7.7.27.3. Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

7.7.28.1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenjang dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidikan yang mempunyai wewenang mengajar.

7.7.28.2. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.

7.7.28.3. Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui Lembaga pendidikan tenaga keguruan.

7.7.28.4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

7.7.29.1. Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mewajibkan Warga negara Republik Indonesia atau meminta Warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu

menjadi tenaga pendidik.

- 7.7.29.2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 7.7.30. Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - 7.7.30.1. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan ;
 - a. tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri;
 - b. Pemerintah dapat memberikan tunjangan tambahan bagi tenaga kependidikan ataupun golongan tenaga kependidikan tertentu;
 - c. Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh gaji dan tunjangan dari badan/perorangan yang bertanggung jawab atas satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - 7.7.30.2. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja.
 - 7.7.30.3. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
 - 7.7.30.4. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya.
 - 7.7.30.5. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam pelaksanaan tugasnya.
- 7.7.31. Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk;
 1. membina Loyalitas pribadi peserta didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 2. Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa;
 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian;
 4. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa;
 5. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan negara.
- 7.7.32.1. Kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasi.
- 7.7.32.2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Pemerintah.
- 7.7.32.3. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

7.7.32.4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bab. 8. Sumber Daya Pendidikan.

8.8.33. Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.

8.8.34.1. Buku pelajaran yang digunakan dalam pendidikan jalur pendidikan sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

8.8.34.2. Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh Pemerintah ataupun swasta.

8.8.35. Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar.

8.8.36.1. Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggungjawab Pemerintah.

8.8.36.2. Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan.

8.8.36.3. Pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bab . 9. Kurikulum.

9.9.37 Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

9.9.38.1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas pendidikan yang bersangkutan.

9.9.38.2. Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri.

9.9.39.1. Isi Kurikulum merupakan susunan bahan kajian pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

9.9.39.2. Isi Kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat;

- a. pendidikan Pancasila;
 - b. pendidikan agama; dan
 - c. pendidikan Kewarganegaraan.
- 9.9.39.3. Isi Kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian pelajaran tetang;
- a. pendidikan Pancasila;
 - b. pendidikan agama;
 - c. pendidikan Kewarganegaraan;
 - d. bahasa Indonesia;
 - e. membaca dan menulis;
 - f. matematika; (termasuk berhitung)
 - g. pengantar sains dan teknologi;
 - h. ilmu bumi;
 - i. sejarah nasional dan sejarah umum;
 - j. kerajinan tangan dan kesenian;
 - k. pendidikan jasmani dan kesehatan;
 - l. menggambar; serta
 - m. bahasa Inggris.
- 9.9.39.4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur oleh Menteri.
- Bab. 10. Hari Belajar Dan Libur Sekolah.
- 10.10.40.1. Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu) tahun untuk setiap pendidikan diatur oleh Menteri.
- 10.10.40.2. hari- hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Menteri dengan mengingat ketentuan hari raya nasional, kepentingan pendidikan, kepentingan agama dan faktor musim.
- 10.10.40.3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengatur hari-hari liburnya sendiri dengan mengingat ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 dan 2.
- Bab. 11. Bahasa Pengantar.
- 11.11.41. Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.
- 11.11.42.1. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian ilmu pengetahuan dan / atau ketrampilan.
- 11.11.40.2. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan / keterampilan

tertentu.

Bab. 12. Penilaian.

- 12.12.43. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian.
- 12.12.44. Pemerintah dapat menyelenggarakan peningkatan hasil belajar suatu jenis dan / atau jenjang pendidikan secara nasional.
- 12.12.45. Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- 12.12.46.1. Dalam rangka pembinaan satuan pendidikan. Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala.
- 12.12.46.2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan secara terbuka.

Bab. 13. Peserta masyarakat.

- 13.13.47.1. Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luas untuk berpartisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 13.13.47.3.3. Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bab.14. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional.

- 14.14.48.1. Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan Menteri berkenaan dengan sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui suatu badan pertimbangan pendidikan nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh dan yang menyampaikan saran, nasehat, dan pemikiran lain sebagai bahan pertimbangan.
- 14.14.48.2. Pembentukan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dan pengangkatan anggota-anggotanya dilakukan oleh Presiden.

Bab. 15. P e n g e l o l a a n.

- 15.15.49. Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.
- 15.15.50. pengelolaan satuan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Menteri lain atau pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 15.15.51. Pengelola satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan/ perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bab.16. Pengawasan.

- 16.116.52. Pemerintah melakukan pengawasan atau penyelenggaraan

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

16.16.53. Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini.

Bab. 17. Ketentuan Lain - lain.

17.17.54.1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri khusus bagi peserta didik Warga Negara adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.

17.17.54.2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan di Wilayah Republik Indonesia oleh perwakilan negara asing tidak termasuk sistem pendidikan nasional.

17.17.54.3. Peserta didik warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

17.17.54.4. Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional atau yang diselenggarakan oleh pihak asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

17.17.54.5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bab. 18. Ketentuan Pidana.

18.18.55.1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 ayat 1 di pidana penjara selama - selamanya 18 (Delapan Belas) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah).

18.18.55.2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kejahatan.

18.18.56.1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 ayat 2, pasal 20, dan pasal 29 ayat 1 dipidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000.00 (Lima juta rupiah).

18.18.56.2. Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

bab.19. Ketentuan Peralihan.

19.119.57. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang

dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan Undang - undang Nomor 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembar Negara Nomor 1961 Nomor 302,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang - undang Nomor19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

Bab. 20. Ketentuan Penutup.

- 20.20.58. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang - undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar pendidikan Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) dinyatakan tidak berlaku.
- 20.20.59. Undang-undang ini mulai berlaku mulai diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dikutip dari Undang - Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 2 Th. 1989).
- 4.1.2. Peraturan Pemerintah yang mengatur pendidikan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya terdiri dari :

- a. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah berisi 14 bab yakni sebagai berikut ; 1. Ketentuan umum, 2. Tujuan, 3. Bentuk satuan dan lama pendidikan, 4. Syarat dan tata cara pendidikan, 5. Program kegiatan belajar, 6. Penyelenggaraan pendidikan, 7. Pengelolaan, 8. Tenaga Kependidikan, 9. Pembiayaan, 10. Penilaian, 11. Pengawasan dan pembinaan, 12. ketentuan lain, 13. Ketentuan peralihan, dan 14. Ketentuan penutup.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, berisi 16 bab. yakni sebagai berikut; 1. Ketentuan umum, 2. Tujuan pendidikan dasar, 3. Bentuk satuan dan lama pendidikan, 4. Syarat dan tata cara pendidikan, 5. penyelenggaraan pendidikan, 6. Pengelolaan, 7. Kurikulum, 8. Siswa, 9. Penilaian, 10. Bimbingan, 11. pembiayaan, 12. Pengawasan, 13. Pengembangan, 14. ketentuan lain, 15. ketentuan peralihan, dan 16. ketentuan penutup.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, berisi 16 bab. yakni sebagai berikut ; 1. Ketentuan umum, 2. Tujuan pendidikan menengah, 3. Bentuk satuan dan lama pendidikan, 4. Syarat dan tata cara pendidikan, 5. Penyelenggaraan pendidikan, 6. Pengelolaan, 7. Kurikulum, 8. Siswa, 9. Penilaian, 10. Bimbingan, 11. Pembiayaan, 12. pengawasan, 13. Pengembangan, 14. ketentuan lain, 15. Ketentuan peralihan, dan 16. Ketentuan penutup.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, berisi 17 bab. yakni sebagai berikut; 1. Ketentuan umum, 2. Tujuan pendidikan tinggi, 3. penyelenggaraan perguruan tinggi, 4. Kurikulum, 5. Penilaian hasil belajar, 6. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, 7. Gelar dan sebutan lulusan tinggi, 8. Susunan perguruan tinggi, 9. Tenaga kependidikan, 10. Mahasiswa dan alumni, 11. Sarana dan prasarana, 12. pembiayaan, 13. Syarat dan tata cara pembiayaan, 14. Pengawasan dan akreditasi, 15. Kerjasama antar perguruan tinggi, 16. ketentuan peralihan, dan 17. ketentuan penutup.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar biasa, Berisi 17 Bab. yakni sebagai berikut ; 1. ketentuan umum, 2. Tujuan pendidikan luar biasa, 3. jenis kelainan peserta didik, 4. Bentuk satuan dan lama pendidikan, 5. Syarat dan Tata cara pendidikan, 6. Penyelenggaraan pendidikan, 7. pengelolaan, 8. Penyelenggaraan pendidikan, 9. Peserta didik, 10. Tenaga kependidikan, 11. penilaian, 12. Bimbingan dan rehabilitasi, 13. Sumber

- daya,14. Pengawasan,15. pengembangan,16. ketentuan peralihan,17. ketentuan penutup.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah , Berisi 13 bab, yakni sebagai berikut ; 1. Ketentuan umum, 2. Tujuan pendidikan luar sekolah,3. Jenis pendidikan, 4. Penyelenggaraan pendidikan, 5. Tenaga kependidikan, 6. Warga belajar, 7. Kurikulum, 8. Bentuk satuan pendidikan,9. penilaian,10. Pembinaan,11. Ketentuan lain,12. Ketentuan peralihan, 13. Ketentuan penutup.
 - g. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan, berisi 16 bab. yakni sebagai berikut; 1. Ketentuan Umum, 2. Jenis tenaga pendidikan, 3. Hirarki, 4. Wewenang,5. Pengadaan tenaga pendidik,6. Pengadaan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik, 7. Penugasan dan pemberhentian,8. pembinaan dan pengembangan, 9. Wajib kerja, 10. Kesejahteraan, 11. Kedudukan dan penghargaan, 12. Perlindungan hukum, 13. Ikatan profesi, 14. Tenaga kependidikan Warga negara asing, 15. ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, Berisi 9 bab. yakni sebagai berikut; 1. Ketentuan umum, 2. Fungsi dan tujuan peranserta masyarakat, 3. bentuk dan sifat peranserta masyarakat,4. Pelaku peranserta masyarakat,5. Syarat peranserta masyarakat,5. Syarat peranserta masyarakat, 6. Upaya peningkatan peranserta masyarakat,7. Pengawasan,8. Ketentuan peralihan,9. Ketentuan penutup.
 - i. Surat Keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor; 036/U/1993 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi, berisi 9 bab. yakni sebagai berikut ; 1. ketentuan umum ,2. Gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi,3. Jenis gelar akademik, 4. Jenis sebutan profesional,5. Jenis sebutan profesi, 6. Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesional,7. Gelar doktor kehormatan,8. Ketentuan lain dan 9. Ketentuan peralihan.
- 4.1.3. Pelaksanaan Operasional Pembangunan Pendidikan Secara Garis Besar terdapat didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun ' 93 mengenai hal-hal sebagai berikut ;
- a. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa,

mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang maha Esa, berkwalitas, mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

- b. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional harus dapat menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa kebangsaan, kesetiakawanan sosial, sadar dan menghargai pahlawannya serta berorientasi ke masa depan. Dikembangkan budaya belajar agar dapat ditingkatkan dikalangan masyarakat, supaya tumbuh sikap kreatif, inovasi dan keinginan untuk maju.
- c. pendidikan nasional perlu terus di tata, dikembangkan, dan dimantapkan dengan melengkapi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengutamakan pemerataan peningkatan kualitas pendidikan dasar, kejuruan serta pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Upaya ini perlu didukung peningkatan sumber daya pendidikan secara bertahap, terpadu dan efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembangunan.
- d. Pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu serasi, antar berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang pendidikan. Kualitas pendidikan perlu disesuaikan dengan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan disemua jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah terus dikembangkan secara merata diseluruh tanah air dengan memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat, serta yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya.
- f. Pembinaan terhadap pendidikan di Lingkungan keluarga tempat

- pendidikan pertama dan pendidikan prasekolah, disamping sebagai wahana sosialisasi awal sebelum pendidikan dasar, dikembangkan agar lebih mampu meletakkan landasan pembentukan watak dan kepribadian, penanaman dan pengenalan agama dan budi pekerti luhur serta dasar pergaulan. Dalam hal ini perlu keteladanan dan pengembangan suasana yang membantu peletakan dasar kearah pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta.
- g. Pendidikan dasar sebagai awal dari pendidikan disekolah lebih ditingkatkan pemerataan, kualitas, dan pengembangannya agar dapat memberikan dasar pembentukan pribadi manusia sebagai warga masyarakat dan warga negara yang berbudi pekerti, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Serta berkemampuan berkepribadian dasar sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya atau untuk bekal hidup di masyarakat.
 - h. Pendidikan menengah sebagai pendidikan dasar disekolah ditingkatkan agar mampu membentuk pribadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, serta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang memerlukan tenaga yang berkemampuan dan berkepribadian. Perlu diadakan penyesuaian kurikulum dan isi pendidikan serta penyesuaian kurikulum dan isi pendidikan serta penataan kelembagaan pendidikan menengah, termasuk pendidikan kejuruan, yang merupakan pembekalan untuk pendidikan tinggi atau bekal hidup dalam masyarakat.
 - i. Pendidikan tinggi terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, serta kemampuan kepemimpinan, yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Sejalan dengan itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan perguruan tinggi di tingkatkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan kampus dikembangkan sebagai budaya bangsa, bermoral Pancasila, dan berkepribadian Indonesia.
 - j. Pendidikan, pengadaan dan pembinaan guru serta tenaga kependidikan lainnya pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan diseluruh tanah air. Kualitas pendidikannya ditingkatkan dan diselenggarakan secara terpadu

- dalam jumlah yang memadai. Pengembangan karir dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya, termasuk penghargaan bagi yang berprestasi dan yang bertugas di daerah terpencil, ditingkatkan serta penempatannya disebar merata diseluruh tanah air sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional.
- k. Pembinaan dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan, yang merupakan wahana pertama pendidikan diupayakan agar mampu mewujudkan manusia yang berkualitas yang dituntut oleh pembangunan bangsa sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kurikulum perlu terus di kembangkan secara dinamis dengan memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum dan isi pendidikan yang memuat pendidikan pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan disemua jalur, jenis dan jenjang pendidikan nasional. Ilmu dasar, ilmu pengetahuan alam dan ilmu eksakta, ilmu pengetahuan sosial, dan humaniora perlu dikembangkan secara serasi dan seimbang.
 - l. Sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, sarana ketrampilan dan pelatihan, media pengajaran, teknologi pendidikan, serta fasilitas pendidikan jasmani di kembangkan dan di sebarluaskan secara merata untuk membantu terselenggaranya dan meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan persyaratan pendidikan serta kebutuhan pembangunan.
 - m. Penulis, penerjemahan, dan pengadaan buku pelajaran, buku bacaan, khususnya bacaan anak yang berisikan cerita rakyat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terbitan buku lainnya digalakkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah dan kualitas perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara merata diseluruh tanah air, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Didorong iklim yang dapat memotivasi untuk menulis dan menerjemahkan buku dengan penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan hak cipta.

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993.81-85.

4.2. Muatan Lokal Sistem Pendidikan Nasional.

4.2.1. Pendidikan Ekstra Kurikuler.

Pelajaran kurikuler dilaksanakan di luar jam pelajaran. Untuk beberapa sekolah pelaksanaannya di lakukan pada waktu antara pukul empat belas

sampai dengan pukul tujuh belas. Ada juga sekolah yang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler pada waktu antara pukul sembilan sampai pukul sebelas. Hal ini seperti ini dilakukan sebab mereka ada yang sekolah siang.

Ada juga yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pada hari minggu, waktunya atau jam pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan antara peserta didik dengan guru. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan, untuk mengisi waktu di luar jam pelajaran agar para peserta didik memiliki kegiatan yang terarah dan positif. Umpamanya kegiatan pramuka, kegiatan Palang Merah Remaja. Usaha Kesehatan Sekolah, Melukis, Drama, Pekerjaan tangan atau Prakaryat dan lain-lain sebagainya.

Selain itu ada pula guru bidang studi yang memberikan pelajaran tambahan suatu mata pelajaran tertentu, tidak dimasukkan dalam kegiatan kurikuler, tetapi di masukkan ke kegiatan ekstra. Ini dimaksudkan agar pelajaran yang dimaksud dapat lebih terpacu. Pemberian pelajaran ini, akan memakan waktu antara dua sampai lima jam.

4.2.2. Pendidikan Pertanian dan Peternakan

A. Kegiatan pertanian dilaksanakan di wilayah sekolah yang memiliki lahan, tanah pekarangan dilingkungan sekolah, dapat di pergunakan untuk pertanian atau bercocok tanam. Sekolah yang memiliki lahan seperti ini biasanya adalah sekolah-sekolah di desa atau pedesaan. Menurut kondisinya tanah pertanian tersebut dapat dibagi dalam tiga golongan. Pertama golongan tanah pertanian yang selalu memerlukan air secara terus menerus dan tanah seperti ini disebut tanah persawahan/tanah sawah. Pertanian semacam ini yang ditanam ialah padi. Kedua tanah pertanian yang tidak selalu memerlukan air, disebut ladang atau huma. Jenis tanaman yang ditanam biasanya untuk kebutuhan sayur mayur. Umur tanaman semacam ini tidak terlalu lama, cukup sekitar seratus hari, atau antara tiga sampai empat bulan. Ketiga tanaman yang tidak memerlukan air, ini arinya pada waktu tanaman masih kecil memang diperlukan penyiraman, tetapi setelah tanaman itu besar cukup hanya dari air hujan saja. Ini juga disebut tanaman keras. Pertanian semacam ini juga disebut perkebunan. Umpamanya perkebunan pepaya, mangga, apel, salak dan lain-lain sebagainya.

B. Kegiatan peternakan dilaksanakan di sekolah yang memiliki lahan atau tanah yang relatif luas. Peternakan dilaksanakan di sekolah-

sekolah yang terdapat di pedesaan. Ini juga tidak berarti bahwa sekolah yang ada dipedesaan selalu memiliki lahan untuk itu. Hewan ternak yang dapat dipelihara disini terbatas pada hewan yang dikonsumsi masyarakat, misalnya ayam, itik atau bebek baik itik jawa atau itik manila. Bagi sekolah yang memiliki tambak atau empang dapat dipelihara di sini macam-macam ikan termasuk juga udang. Kedua kegiatan tersebut yaitu pertanian dan peternakan, di wilayah kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah tidak ditemukan, karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh sekolah itu.

4.2.3. Pendidikan Menjahit.

Kegiatan menjahit dapat dan dilaksanakan disekolah -sekolah yang umumnya terdapat dikota besar. Dari kegiatan ini dapat diambil manfaat yang sangat besar, terutama bagi mereka yang tidak dapat meneruskan sekolahnya, dengan alasan tidak ada atau tidak mampu, sehingga terpaksa putus sekolah. Tidak banyak sekolah di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta yang memberikan pelajaran menjahit.

4.2.4. Pendidikan Perbengkelan

Kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan disekolah yang terdapat dikota besar. Jenis perbengkelan yang dimaksud misalnya ialah; bengkel las, bengkel sepeda , bengkel sepeda motor, bengkel mebel dan lain-lain sebagainya. Pelajaran yang diberikan ; bagaimana cara mengelas yang baik dan benar , bagaimana cara memperbaiki sepeda/motor yang rusak dan bagaimana merakit mebel atau memperbaiki mebel yang rusak. Muatan lokal seperti yang terurai tersebut diatas di wilayah Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat khususnya, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada umumnya belum dapat dilaksanakan. Dari hasil penelitian melalui beberapa tokoh dan pejabat dilingkungan kependidikan ditemukan beberapa faktor penyebab, diantaranya belum didukung oleh kurikulum yang ada disekolah, lingkungan sekolah yang tidak mendukung dan tenaga pendidik yang belum disiapkan.

4.3. **Pendidikan Sekolah Telah Terserap Kedalam Sistem Budaya Masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.**

- a. Pendidikan Sekolah berdampak mobilisasi dan meningkatkan status sosial masyarakat. Dari wilayah tempat penelitian akan diangkat dua sampel keluarga yang dianggap dapat mewakili wilayah lain, dalam hal keberhasilan pembinaan keluarga n engantar anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi dan meraih yang baik. Keluarga bapak Haji Sachrowardi,SH. Umur sekitar 64 tahun. Alamat, di jalan

Bendungan Hilir Rt. 04 Rw.01. Karyawan PD. Pasar Jaya yang mutasi ke Bank Rakyat Indonesia dan kini telah pensiun. Keluarga ini memiliki lima orang anak laki-laki. Karena bimbingan kedua orang tua kelima anak itu berhasil menyelesaikan pendidikannya ke perguruan tinggi, dan tentu saja menyandang gelar kesarjanaannya masing-masing. Kelima anaknya itu, empat orang telah bekerja dan seorang berwiraswasta. Ini artinya keluarga tersebut telah memperoleh status kehidupan dan status kesejahteraan yang meningkat. Status sosial ekonomi yang meningkat lebih baik dari sebelumnya akan memiliki, mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sosial budayanya. Keluarga bapak Haji Mohammad Nawawi, Drs. Usia sekitar 62 tahun. Alamat, Gang Batik Nomor 1. Rt 11/Rw 01. Pekerjaan, Pengajar/Dosen salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Tetapi juga pensiunan dari Perusahaan Negara Pertamina dan juga pensiunan karyawan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Dalam Masa tuanya itu sekarang masih aktif mengajar diperguruan tinggi. Keluarga ini dikaruniai tujuh orang anak, terdiri dari lima orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kedua orangtua ini telah membimbing anak-anaknya dan membawanya sekaligus pada keberhasilan yang cukup baik. Lima orang anak telah lulus dari perguruan tinggi negeri, seorang lulus dari Pasca Sarjana dan tinggal seorang yang belum berhasil dari perguruan tinggi. Kedua contoh Keluarga dari wilayah Bendungan Hilir ini, mereka termasuk keluarga yang mendapat pembinaan dan bimbingan orang tua sejak awal pembangunan Lima Tahun pada masa orde baru. Artinya mereka masuk dalam masa Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap Pertama. Mereka ini adalah sampel dari hasil pembangunan di bidang pendidikan di lingkungan keluarga. Diwilayah lain di lima wilayah kota juga akan ditemukan keluarga seperti tersebut diatas. Minat masyarakat agar dapat menjangkau dan meraih pendidikan tinggi telah mendorong semua lapisan masyarakat. Tidak terbatas pada masyarakat lapisan atas saja, tetapi disemua lapisan. Faktor yang menghambat hanya di dalam pemilikan dana atau uang/biaya. Keluarga diatas termasuk yang memiliki dana dan biaya lain sebagai penunjang.

- b. Dalam perkembangannya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sekarang telah memiliki Sekolah Menengah Tingkat Atas sebanyak 1.231 sekolah negeri. Jika dengan yang berstatus swasta mencapai jumlah 1.615 buah sekolah. Dari sekolah sebanyak itu setiap tahun dapat diperkirakan tujuh puluh ribu siswa yang akan ikut dalam Ujian Masuk

Perguruan Tinggi Negeri di Jakarta. Mereka semua berharap dapat lulus dan masuk ke perguruan Tinggi negeri, dan untuk mendapat kesempatan ini mereka harus bersaing ketat. Daya tampung di Perguruan tinggi negeri sangat terbatas serta keterbatasan dana yang tersedia. Untuk mereka yang mampu dapat memasuki Perguruan tinggi Swasta. Sedang untuk mereka yang tidak tertampung dapat mencari Lapangan pekerjaan atau berwiraswasta. Bagi mereka yang memiliki dana dan ketrampilan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Bagi mereka yang tidak didukung oleh beberapa faktor tersebut di atas terpaksa menjadi penganggur.

- c. pengaruh Negatifnya Terhadap Sosial Budaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada waktu pelaksanaan pendidikan tradisional, disamping mengacu pada ajaran agama Islam masalah filsafat dan etika yang diperoleh dari ajaran agama tersebut sangat berpengaruh pada sistem pendidikan yang sedang berlaku. Didalam sistem pendidikan sekolah tradisional yang terdapat di lingkungan keluarga, prosesnya sangat tergantung pada tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki orang tua. Tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki orang tua pada waktu itu relatif rendah. Karenanya taraf perilaku dalam kehidupan dan penyerapan perilaku yang datang dari budaya tradisional dan asing juga relatif rendah. Kemudian ketika masuk pengaruh budaya barat di wilayah ini, baru dapat dirasakan adanya pengaruh pendidikan yang menyeluruh. Artinya pendidikan juga diperlukan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Sistem pendidikan sekolah dari barat ini diterapkan melalui sekolah pada tahap permulaannya. Dalam pelaksanaan tidak banyak dirasakan kemajuannya. Pandangan masyarakat/penduduk pada waktu itu belum sempat menyadari apa dan untuk apa manfaat pendidikan itu. melalui proses yang sangat panjang, yaitu ketika pemerintah membutuhkan pegawai atau karyawan yang akan digunakan untuk menjaga lancarnya administrasi, baru dirasakan perlu membuka beberapa sekolah oleh pemerintah. Ketika itu seseorang yang dapat dan cakap menggunakan bahasa belanda, mereka sudah merasa status tinggi. Dan ini banyak dilakukan oleh penduduk pendatang, perantauan atau warga negara Indonesia asli keturunan asing. Sedangkan untuk penduduk asli Betawi banyak yang tidak mau memasukan anaknya ke pendidikan sekolah yang dibuka pemerintah. Mereka lebih senang memasukan anaknya ke sekolah agama. Penduduk yang memasukan anaknya ke sekolah

agama khususnya agama islam pada umumnya hanya sampai pada tingkat sekolah dasar, sesudah itu berhenti untuk bekerja atau membantu orang tua dalam berusaha, bertani, berdagang dan berwiraswasta. Oran tua atau penduduk yang masih memiliki pola pikir seperti ini hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk yang ada. Penduduk Kelurahan Bendungan Hilir yang mengalami perubahan karena perkembangan pola pikir akibat pendidikan sekolah berpengaruh langsung dalam pola kehidupan dan perilakunya. Mereka berpikir pada hal-hal yang praktis. Mudah di mengerti dan mudah dilaksanakan dan tidak banyak mengandung resiko. Perilaku mereka telah berubah dari perilaku lama ke perilaku yang baru. Kebiasaan yang dahulu sukar dilanggar, kini telah ditinggalkan dan di ganti dengan kebiasaan yang baru. Kehidupan pada waktu itu di cerminkan dalam bentuk perilaku mengalami kemunduran. Artinya budaya penduduk telah mendapat pengaruh yang negatif. Perilaku lama ditinggalkan, karena merasa senang dengan perilaku yang baru dianggap lebih mudah dan praktis. Tata cara dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat yang begitu indah dan menarik ditinggalkan. Mereka lebih senang melaksanakan perkawinan seperti yang dilaksanakan oleh sebagian penduduk pendatang. Pelaksanaannya lebih mudah dan lebih praktis, serta tidak mengandung resiko karena telah dijamin oleh pemerintah. Sekarang kita sudah kehilangan satu warisan, yaitu kebiasaan atau adat perkawinan dengan tata cara yang bagus dan memiliki nilai seni yang tinggi. Kehilangan ini akan disusul dengan kehilangan perilaku yang lain dan seterusnya. Kehidupan sosial budaya keluarga pada waktu itu benar telah mendapat pengaruh kuat, akibat masuknya budaya yang dibawa penduduk pendatang dan budaya asing. Mereka terbawa oleh arus kebudayaan tersebut dan meninggalkan kebudayaan yang telah mereka miliki sejak lahir di kota tercinta ini.

- 4.4. Sikap penduduk terhadap pendidikan sekolah kejuruan/umum. Mengirimkan anak kesekolah kejuruan dengan harapan segera mendapatkan pekerjaan. Bagi penduduk yang mempunyai minat dan tujuan agar anaknya kelak menjadi orang pintar, dan menyandang gelar, mereka akan memasukkan anaknya kesekolah umum atau SMA. Kemudian setelah tamat dapat melanjutkan keperguruan tinggi di universitas atau institut. Penduduk yang bercita-cita dan harapan agar anaknya cepat dapat mandiri dan bekerja, memasukkan anaknya kesekolah kejuruan, misalnya ke sekolah teknik,

sekolah ekonomi, sekolah kesejahteraan keluarga dan sebagainya. Mengirim anak ke sekolah kejuruan dengan harapan segera mendapatkan pekerjaan. Pengembangan pendidikan menengah sebagai lanjutan pendidikan dasar di sekolah di tingkatkan agar mampu membentuk pribadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Serta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang memerlukan tenaga berkemampuan dan berketrampilan. Perlu adanya penyesuaian kurikulum dan isi pendidikannya, serta penataan kelembagaan pendidikan menengah termasuk pendidikan kejuruan. Kejuruan teknik, kejuruan ekonomi, kejuruan kesejahteraan keluarga dan sebagainya, yang merupakan pembekalan untuk pendidikan tinggi atau untuk bekal hidup dalam masyarakat (Garis Garis Besar Haluan Negara/1993.J.83). Pendaftaran di perguruan tinggi negeri maupun swasta jumlahnya menurun dalam persentasenya pada kurun waktu belakangan ini. Banyak pemuda yang memilih melanjutkan disekolah kejuruan dari pada melanjutkan di perguruan tinggi. Harapan itu seringkali meningkat menjadi tuntutan agar sekolah menghasilkan tenaga kerja siap pakai atau tenaga kerja trampil. Pembinaan dan pengembangan Kurikulum dan isi pendidikan, yang merupakan Wahana utama pendidikan, diusahakan agar mampu mewujudkan manusia yang berkwalitas (sumber daya manusia), yang dituntut oleh pembangunan. Agar dapat diperoleh sumber daya manusia yang berkwalitas, kurikulum perlu terus dikembangkan secara dinamis.

BAB V

DAMPAK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEKOLAH TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA KELUARGA

5.1. Struktur dan Komposisi Keluarga

Penduduk di daerah penelitian kini pada umumnya dibangun berdasarkan susunan keluarga inti (nuclear family) yang terdiri dari seorang Ayah, seorang Ibu dan Anak-anak yang belum kawin. Seperti di daerah lainnya di DKI Jakarta, disini telah terjadi pergeseran nilai, yaitu pada masa lalu menurut adat istiadat susunan keluarga orang Betawi merupakan bentuk keluarga luas (extended family), hal ini sebagai salah satu dari dampak pembangunan pendidikan yang mempengaruhi sikap dan mental penduduk. Disini dapat kita lihat terjadi perubahan sikap mental sebagai akibat kemajuan pendidikan yang kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya keluarga, yang pada masa lalu struktur keluarga luas (extended family) dianggap baik, oleh karena didalam keluarga luas seperti itu, meskipun rumah tangga si anak kurang mampu untuk berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka masih merupakan tanggungan orang tuanya maka, mereka tetap dibiayai atau dibantu biaya hidup oleh orangtuanya. Jadi budaya gotong royong masih kuat dalam struktur keluarga luas. Sedangkan kemudian pergeseran terjadi akibat pengaruh pendidikan, yaitu struktur keluarga kecil (nuclear family) dianggap lebih baik pada masa sekarang. Struktur keluarga kecil lebih menunjukkan ciri-cirinya seperti antara lain : kemandirian dari keluarga yang bersangkutan. Peningkatan harkat hidup masyarakat seperti tersebut diataslah yang perlu kita tingkatkan lagi dan yang perlu kita jaga jangan sampai berkembang adalah pergeseran budaya, yang mengarah kepada sifat-sifat Individualistis yang bertentangan dengan akar budaya bangsa Indonesia.

5.2. Pola Menetap Setelah kawin.

Seorang anak yang telah menikah dari suatu keluarga pada umumnya akan segera keluar dari rumah orang tuanya, untuk membentuk rumah tangga baru dan biasanya mereka bertempat tinggal di rumah penganten laki-laki atau dirumah yang dibeli bersama oleh pasangan suami-istri yang bersangkutan.

Sedangkan bagi mereka yang belum memiliki rumah ada pula yang menempati rumah kontrakan. Hal ini merupakan suatu bukti yang menunjukkan tingkat kematangan perkawinan dan memperlihatkan kemandirian mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para guru yang menjadi mahasiswa penyeteraan diploma II angkatan tahun 1992/1993. Mereka masih banyak yang tinggal di rumah rumah kontrakan. Meskipun mereka dengan cara mengkontrak rumah, mereka tetap bertempat tinggal diluar keluarga orang tuanya.

Penghasilan guru guru belumlah cukup memadai sehingga keadaan keuangan mereka yang belum memungkinkan untuk memiliki rumah tempat tinggal, sebab pada dasarnya penghasilan guru guru ini belum memadai untuk hidup layak, sehingga kehidupan mereka belum tenang dan jauh dari sejahtera. Dengan demikian kita sulit mengharapkan guru-guru untuk dapat memberikan perhatian dan pengabdian sepenuhnya terhadap pendidikan dan anak didik khususnya, sebab guna tercapainya tujuan pendidikan perhatian dan pengabdian yang penuh dari para guru sangatlah penting. Oleh karena kesejahteraan guru-guru merupakan salah satu kunci yang sangat penting dan besar pengaruhnya dalam proses pendidikan, sehingga pengadaan perumahan bagi guru-guru tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Begitu pula jarak tempuh antara sekolah dengan rumah guru sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Jika guru terlambat datang, maka proses belajar mengajar akan terganggu dan hal ini berdampak buruk terhadap anak didik. Kekosongan pada waktu jam mata pelajaran sebagai yang tersebut diatas memberikan peluang bagi para siswa untuk berbuat keributan di sekolah dan di luar sekolah bahkan dapat menjadi penyebab terjadinya perkelahian pelajar. Untuk itu perlu diperhitungkan, apabila ada pembangunan sekolah supaya diikuti pula dengan pembangunan perumahan para guru.

Disamping hal tersebut diatas, jika mereka ingin mencari tambahan penghasilan dengan bekerja sambilan, menurut keterangan guru-guru yang menjadi mahasiswa penyeteraan Diploma II, dikatakan bahwa Guru-guru pada umumnya tidak sempat lagi mengerjakan pekerjaan sambilan diluar jam kerja sebagai guru. Oleh karena itu fasilitas untuk guru harus lebih ditingkatkan untuk kesejahteraan mereka. Dengan demikian akan didapat kemantapan para guru dalam mencurahkan sepenuhnya perhatian dan pengabdiannya pada tugas yang diembannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses belajar mengajar.

Selain itu perumahan bagi guru-guru, juga fasilitas perlengkapan sekolah untuk belajar mengajar belum memadai pula. Dengan demikian diperlukan

pengadaan alat-alat perlengkapan belajar mengajar yang lebih cukup diantaranya laboratorium untuk praktek, alat-alat peraga untuk mengurangi sistem mengajar yang bersifat verbalisme yang selama ini dilakukan dalam proses belajar mengajar. Walaupun kesemuanya itu membutuhkan dana yang cukup besar untuk pengadaannya, namun sangat penting untuk mengupayakan pengadaannya.

5.3. Usia Kawin dan Kematangan Perkawinan

Pada periode tahun 1960-an, usia kawin anak perempuan pada umumnya masih berumur belasan tahun, apabila anak perempuan sudah mendapat menstruasi dianggap sudah pantas untuk menikah. Sedangkan bagi laki-laki jika suaranya sudah berubah dari suara anak-anak menjadi suara orang dewasa. Kebiasaan menikahkan anak pada usia yang relatif masih muda seperti itu sudah tidak dilakukan lagi pada jaman sekarang ini di daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Usia kawin dewasa ini telah berubah menjadi rata-rata 20 tahun ke atas. Pada dasarnya anak-anak muda khususnya dan masyarakat pada umumnya sekarang sudah menyadari pentingnya untuk menuntut ilmu lebih dahulu dan setelah bekerja barulah mereka menikah. Hal ini merupakan dampak positif dari pembangunan pendidikan sehingga terjadi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat menuju kearah peningkatan kesejahteraan keluarga yang kemudian dapat menyebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya akan membawa kemakmuran bangsa. dengan demikian pergeseran nilai budaya disini bergerak kearah positif yang secara tidak langsung dapat meningkatkan derajat hidup bangsa Indonesia.

5.4. Pandangan Terhadap Pendidikan

Selain peranan guru, keluarga memegang peranan sangat penting dalam proses pendidikan. Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama yang berfungsi mendidik anak, mentransformasikan nilai etika, moral dan memacu perkembangan psikomotor, psikoemosional serta kognitif. Oleh karena itu kesadaran keluarga dalam berperan dalam sistem pendidikan dasar 9 tahun, sangat menentukan disamping itu juga pendidikan merupakan motor penggerak pembangunan untuk menuju kepada kehidupan yang berkemakmuran dan berkeadilan guna menopang kesejahteraan keluarga, maka dari itu perlu memusatkan perhatian kepada upaya peningkatan pendidikan keluarga melalui jalur luar sekolah disamping pendidikan disekolah. Usaha-usaha seperti itu sejalan dengan cita-cita pemerintah Indonesia untuk mengangkat kualitas manusia dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai sumber daya manusia setaraf dengan bangsa-bangsa lain didunia.

Kemudian untuk meningkatkan hubungan dunia pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia, pemerintah akan meningkatkan Link and match (keterkaitan dan kesempatan) melalui koordinasi yang baik dengan departemen maupun masyarakat, sehingga lulusan dunia pendidikan baik dalam jumlah, kualitas maupun jenis profesinya sesuai dengan tuntutan dunia kerja (suara Karya, 6 Agustus 1993).

Sehubungan dengan link and match tersebut diatas masyarakat dewasa ini tidak lagi berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, mereka sudah mulai selektif dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya yaitu mereka sudah mulai mengarahkan sekolah anak-anaknya kesekolah kejuruan untuk kemudian supaya segera mendapatkan pekerjaan dan jika sudah bekerja mereka yang gigih untuk meningkatkan taraf hidupnya akan mulai kuliah lagi. Demikian perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini diwilayah DKI Jakarta, terutama di daerah penelitian yang masyarakatnya pada umumnya berpenghasilan menengah kebawah.

5.5. Pandangan Terhadap Kesehatan .

Keluarga guru pada umumnya mereka memiliki kesadaran kesehatan yang cukup baik, apabila diantara anggota keluarganya ada yang sakit mereka segera melakukan tindakan untuk membawa anggota keluarganya yang sakit ke puskesmas, kedokter, atau kerumah sakit. Begitu pula perhatiannya terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya, mereka dengan teratur memeriksakan pertumbuhan dan kesehatan anak-anak mereka ke pos yandu.

Keluarga guru ini jarang memakai obat-obatan yang dijual bebas di warung atau toko-toko obat -obatan tradisional. Namun demikian, didalam merawat kesehatan keluarganya mereka juga kadang-kadang tidak terlepas dari pengobatan tradisional yaitu memakai jasa para "Dukun" atau orang pintar apabila sudah tidak bisa diobati dengan pengobatan di rumah sakit atau apabila pengobatan secara medis tidak berhasil.

Selanjutnya sarana dan prasana penunjang kesehatan yang ada di wilayah penelitian antara lain sebagai berikut: di daerah ini terdapat Rumah Sakit Umum Mintoharjo yang dahulunya merupakan Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL). Selain rumah sakit tersebut terdapat pula sebuah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan disamping itu pula terdapat II buah Pusat Pelayanan terpadu (Posyandu) yang tersebar diberbagai RT.

Pihak swasta pun tidak tinggal diam dalam hal ini, mereka berperan aktif yaitu menunjukkan partisipasinya dengan membangun Balai Pengobatan. Untuk menunjang dan menanggulangi masalah kesehatan penduduk di daerah penelitian ini, ada 3 buah laboratorium, 3 buah Apotik, 2 buah Optik untuk melayani masyarakat.

Di samping yang telah tersebut diatas yang menunjang kesehatan masyarakat adalah sejumlah 21 buah praktek Dokter umum dan 4 buah Dokter spesialis. 14 buah Dokter Gigi, 49 Kader Gizi, 1 buah klinik Rongsent dan 3 buah praktek Bidan.

Begitu juga pemanfaatan jasa kesehatan secara tradisional pun tidak kalah pentingnya di dalam usaha mengupayakan kesehatan masyarakat di daerah Bendungan Hilir ini, yaitu dapat kita jumpai tempat tempat tradisional antara lain : 2 buah panti pijat, 4 Dukun peraji dan 1 orang Sinshe.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang Undang dasar 1945 menugasi kepada kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan kehidupan dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia.

Di dalam salah satu pasal undang-undang dasar itu dinyatakan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengupayakan serta penyelenggaraan suatu sistem pengajaran nasional, diatur dengan undang-undang.

Upaya itu dirumuskan di dalam Garis -Garis Basar Haluan Negara tahun 1993 diantaranya menyatakan bahwa, pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia, memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil.

Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan lainnya. Pembaharuan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan zaman dan tahapan pembangunan, serta penyediaan prasarana dan sarana yang memadai.

Pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan dilakukan sedini mungkin merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu peran aktif masyarakat dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan perlu ditingkatkan.

Untuk menjawab hal-hal seperti tersebut diatas, diantaranya oleh pemerintah dibuka program penyeteraan diploma dua guru sekolah dasar. Pelaksanaannya dibebankan pada anggaran pemerintah pusat (APBN), pada anggaran pemerintah daerah (APBD) dan anggaran swadaya masyarakat.

Pada tahun lima puluhan, yang mendiami wilayah kelurahan Bendungan Hilir selain penduduk asli Betawi didiami penduduk berasal dari kampung

ketapang. Kampung ini akan digunakan oleh pemerintah, sehingga penduduk harus digusur. Lokasi yang di maksud sekarang berdiri supermarket Sarinah.

Di wilayah ini didirikan bebarapa lembaga pendidikan oleh swasta diantaranya : Madrasah Haji Sidik, Madrasah Al Abror dan sekolah koperasi pedagang Batik Djakarta (KPBD).

Kehidupan sosial budaya penduduk pada waktu itu masih terbiasa melaksanakan kebiasaan-kebiasan tradisional sifatnya. Setelah anaknya tamat mengaji diadakan upacara Chatam diiringi musik tradisional robana. Sunatan atau Chitanan dirayakan dengan cara mengarak pengantin sunat itu keliling kampung naik kuda, serta dihias seperti anak seorang raja. Perkawinan cara Betawi yang cukup unik dan sebagainya. Budaya seperti ini yang mewarnai wilayah Bendungan hilir waktu itu yang membuat semarak kehidupan penduduk.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan yang dilaksanakan melalui prograam pembangunan lima tahun, sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya tiap keluarga. pelaksanaannya dengan tidak melaksanakan lagi kebiasaan - kebiasaan diatas.

Faktor penyebabnya ialah semakin banyak penduduk berasal dari pendatang atau perantauan. Mereka melakukan adat kebiasaan yang dibawa dari tanah kelahirannya. Pengaruh seperti ini sangat dominan, sehingga acara yang tradisional yang merupakan kebiasaan asli Betawi, tidak lagi mudah ditemukan diwilayah ini.

Dari sisi lain pengaruh pembangunan pendidikan sekolah terhadap kehidupan sosial budaya keluarga di wilayah ini sangat kuat. Dapat ditemukan tampilnya beberapa keluarga yang memperoleh keberhasilan karena anak-anaknya dapat meraih gelar kesarjanaan, bahkan ada yang seluruhnya anak yang lima meraih gelar sarjana semuanya.

Penggusuran yang terjadi di daerah ini berdampak semakin hilangnya penduduk asli Betawi. Mereka meninggalkan wilayah ini dan mereka bertempat tinggal di pinggir/ luar kota.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan melalui program penyeteraan diploma dua, dalam tujuan peningkatan sumber daya manusia itu baik, namun perlu dipikirkan waktu pelaksanaannya. Jika mungkin jangan pada hari minggu, tetapi pada hari Sabtu. Alasannya kesempatan untuk berkumpul keluarga yang terdiri dari, ayah, ibu dan anak hanya pada hari minggu, karena hari-hari lain

masing sibuk.

Struktur dan komposisi keluarga, penduduk di daerah penelitian dibangun berdasarkan susunan keluarga inti. Seperti di daerah lain diseluruh Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disini telah terjadi pergeseraan nilai. Pada masa lalu adat istiadat yang di laksanakan susunan keluarga orang Betawi merupakan bentuk keluarga luas. Salah satu dampak pembangunan pendidikan yang dapat mempengaruhi sikap dan mental penduduk.

Meskipun terjadi pergeseran nilai, namun sistem budaya gotong royong kini masih tetap dominan dan kuat dalam struktur keluarga. Pergeseran nilai budaya yang mengarah kepada sifat-sifat individualistis tidak nampak jelas dalam keluarga.

Pada umumnya anak yang telah menikah atau kawin, tidak lagi menetap tinggal di rumah orang tua pihak laki-laki atau pihak wanita, tetapi mereka melepaskan diri dari sifat ketergantungan kepada kedua orang tua, dengan cara mengontrak, menyewa atau membeli rumah sendiri.

Penghasilan guru belumlah memadai, sehingga karena keadaan kesejahteraan, belum mungkin memiliki rumah tinggal. Untuk ini pemerintah dihimbau untuk berupaya menyediakan perumahan bagi guru. Kemudian baru guru dapat dituntut pengabdianannya. Artinya jika penghasilan guru memadai, disediakan perumahan, guru mengajar hanya pada tugas pokoknya saja.

Guru lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan, dengan peraturan, situasi dan kondisi dalam masyarakat. Usia perkawinan seorang guru rata-rata di atas duapuluh tahun. Ikut aktif melaksanakan program keluarga Berencana (program keluarga kecil bahagia).

Keluarga merupakan lembaga penting dalam proses pembangunan pendidikan sekolah. Keluarga merupakan lembaga pertama dan lembaga utama yang berfungsi mendidik anak mentransformasikan nilai, misalnya yang memacu pada perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik.

Untuk meningkatkan hubungan dunia pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia, pemerintah meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan melalui koordinasi yang baik, antara pemerintah, masyarakat dan negara sehingga lulusan dapat diterapkan dan cocok dengan kebutuhan lapangan kerja yang disesuaikan dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tersebar nya beberapa lembaga kesehatan, puskesmas, khusus poliklinik, rumah sakit, pusat pengobatan lain, serta banyak ruang dokter, merupakan

dampak dari pembangunan pendidikan khusus dibidang kesehatan.

Supaya dapat tercapai program peningkatan sumber daya manusia sesuai cita-cita rakyat Indonesia yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1993, sudah waktunya acuan Departemen kesehatan bertujuan kepada pelayanan warga negara yang sehat. Dan pelayanan kesehatan bukan hanya kepada warga negara yang sakit saja.

Justru warga negara yang sehat perlu dibina kesehatannya secara teratur, sehingga tercipta manusia Indonesia yang sehat lahir dan batin, cerdas, trampil, bermoral dan memiliki keperibadian yang kokoh dan tangguh.

I N D E K S

- Abad 1
Adil 5
Agama 3
Agraria 27
Asia 2
Alam 4
Asrama 2
Allquran 40
Angka 10
AMS 10.
- Beradab 5
Bahasa 7
Baik 2
Belanda 4
Betawi 17
Budaya 14
- Candi 1
Corak 7
Cipta 13
Ciragil 27
Cilegon 44
Cililitan 27.
- Didik 2
Dialek 16
Dekrit 12
Dinamis 14
Districk 24
Dominan 4.
- Eerste School 8
Ekonomi 10
- Eropa 60
Efisiensi 99
- Fungsi 9
Faktor 57
- Gaib 2
Gelar 15
Gedongan 53
Guru 4
- Harmonis 17
Hadist 58
Hemat 3
Hidup 3
HIS 10
- India 2
Indonesia 11
Ilmu 14
Ilmiah 14
Istri 17
Ibukota 18
Informan 20
Indek 22
Ibtidaiyah 41
Islam 58
Inovatif 99
- Jakarta 16
Jarang 17
Jalur 99
Jenis 99
Jiwa 14
- Kejaksaan 9
Kendala 43
Kuno 1
Kondisi 8
Kolonial 11
Kemanusiaan 5
Kurikulum 10
Kualitatif 23
- Landasan 5
Lembaga 2
Leirissa 5
Luhur 14
- Mandala 2
Magelang 9
Melayu 9
MULO 10
Mitra 100
- Nirleka 1
Nusantara 1
Nilai-Nilai 6
Negatif 4
Norma 3
- Observasi 23
Orde Baru 12
- Pancasila 12
Pelita 12
Pesantren 2
Proses 50
Pola 2

Positif 4
Prasarana 5
Pemerintah 5
Periodesasi 8
Priyayi 8
Politik 4
Pembina 5
Penerapan 3
Persatuan 5
Presiden 12
Prasekolah 13
Penyetaraan 20

Questioner 23
Quran 40

Ragam 16
Relief 1
Relatif 17
Religius 18
Responden 20

Sarana 6
Sosial 5
Sejarah 1
Sekolah 9
Sinyo 55
Sistimatisasi 8
Swasta 7

Taqwa 13
Taqlim/Taklim 90
Teknologi 18
Tweede School 9

Ulama 1
Unsur 2
Undang-Undang 6

Upaya 6
Vervolg School 10
Variasi 134
Warga 13
Wilayah 16
Wijk 24
Yasaguna 137

QUESTIONER

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :
6. A g a m a :
7. A l a m a t :

B. KENDALA DALAM PENGEMBANGAN POLA NASIONAL

1. Sebagai pendidik, kendala apa yang anda jumpai dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, sebutkan !
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
2. Menurut anda apakah kurikulum pendidikan sekolah sudah memadai sehingga lulusan yang dihasilkan sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia ?
.....
.....
3. Menurut anda apa yang menghambat proses pendidikan sekolah sehingga tujuan pendidikan tidak tercapai ?
.....
.....

C. SUSUNAN KELUARGA

1. Apakah Keluarga anda merupakan keluarga inti (Nuclear family) yang terdiri dari Suami, Istri dan Anak-Anak ? Jawab ya atau tidak.
.....
.....

2. Apakah keluarga anda merupakan keluarga luas (Extended family) yang terdiri dari Suami, Istri, Anak-anak, Mertua , Paman, Tante, Bude, Keponakan ? Jawab ya atau tidak

.....
.....

D. POLA MENETAP SETELAH KAWIN

1. Apakah anda tinggal dirumah orang tua pihak istri sejak menikah ? Jawab ya atau tidak.

.....

2. Apakah anda tinggal dirumah orang tua pihak suami sejak menikah ? Jawab ya atau tidak.

.....

3. Apakah anda tinggal dirumah milik suami sesudah anda menikah ? Jawab ya atau tidak.

.....

4. Apakah anda tinggal dirumah milik istri sesudah anda menikah ? Jawab ya atau tidak.

.....

5. Apakah anda tinggal diluar tempat tersebut diatas kalau ya sebutkan dimana

.....

E. USIA KAWIN DAN KEMATANGAN PERKAWINAN

1. Anda menikah umur tahun

2. Dari segi mental apakah anda sudah merasa siap memasuki kehidupan rumah tangga pada waktu menikah ?

.....

.....

F. VARIASI LAPANGAN PEKERJAAN

1. Disamping menjadi guru, anda bekerja sebagai

.....

.....

G. PANDANGAN TERHADAP KESEHATAN

1. Apabila anda atau keluarga sakit maka anda akan minta pertolongan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

2. Apakah anda juga memakai jasa seorang dukun dalam memperoleh kesembuhan ? Jawab ya atau tidak.

.....

3. Dalam menjaga kesehatan keluarga, apakah anda masih menggunakan obat-obatan tradisional ? Jawab ya atau tidak.

.....

4. Apakah keluarga anda lebih sering memakai obat yang dijual bebas daripada menggunakan obat dengan petunjuk dokter ? Jawab ya atau tidak.

.....

5. Apakah anak balita anda sering diperiksa pertumbuhannya ke posyandu ? Jawab ya atau tidak.

.....

H. PANDANGAN TERHADAP PENDIDIKAN

1. Dalam memilih pendidikan anak-anak anda, apakah anda memilih pendidikan :
 - a. pendidikan umum
 - b. pendidikan kejuruan (lingkari a atau b)
 mengapa demikian ?

.....

.....

.....

.....

2. Apakah anda menyerahkan kepada si anak memilih sekolah sesuai dengan keinginan si anak sendiri ? Jawab ya atau tidak.

.....

 mengapa demikian ?

.....

.....

.....

3. Apakah anda menyekolahkan anak -anak setinggi - tingginya dengan memperhatikan bakat dan kemampuan anak ? jawab ya atau tidak

.....

4. Apakah anda memilih jenjang pendidikan yang singkat untuk anak anda dengan harapan cepat bekerja ? jawab ya atau tidak

.....

5. Apakah anda membedakan pendidikan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam arti pendidikan anak laki-laki harus lebih tinggi dari pada pendidikan anak perempuan, atau sebaliknya ? jawab ya atau tidak

.....

Mengapa Demikian ?

.....
.....
.....
.....

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. _____ *Hukum Adat (Tempo Dulu)*, Anjungan DKI Jakarta TMII, 1988.
2. _____ *Monografi Daerah Khusus Ibukota Jakarta* Jilid I, II , dan III.
3. Puspitasari, dkk., *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah DKI Jakarta*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/'81
4. Sudiyo, dkk., *Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan Keluarga Dan Masyarakat Setempat Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek IPNB, 1989/1990.
5. _____ *Vademicum* ; Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1989.
6. _____ *Beberapa Upacara Adat Sehubungan Dengan Daur Hidup Anak Perempuan Betawi*, Anjungan DKI Jakarta, Jakarta, 1984.
7. Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet Dan Pembangunan*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1974.
8. Soekandar Wiriaatmadja MA, *Pokok - Pokok Sosiologi Pedesaan*, CV. Yasaguna Jakarta.
9. Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*, Penerbit Jambatan Jakarta.
10. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* , Cv. Rajawali, Jakarta 1982
11. _____ *Kebudayaan Dan Pendidikan Nasional*, PT. Balai Pustaka, Jakarta 1964.
12. Dr. H. TH. Fischer, *Pengantar Anthropologi Kebudayaan Indonesia*. Diterjemahkan Oleh; Anas Makruf, Diterbitkan oleh, PT. Pembangunan Jakarta 1976.
13. Rifai Abu, *Adat Dan Upacara Perkawinan Di DKI Jakarta*, Proyek

Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, DKI Jakarta 1977/1978.

14. Drs. Sudjarwo, dkk. , ***Dampak Sosial Budaya Akibat Menyempit nya***Lahan Pertanian, Bagian Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai- Nilai Budaya Daerah Lampung, 1991/1992.

15. Bodhisantoso, Soeboer,"Djakakarta: “ *desa kebun buah-buahan dekat Djakarta*” Masyarakat desa di Indonesia masa kini.

Djakarta ‘ Yayasan Badan Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia,1964.

16. Zulfikar Ghazali,***Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha--Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1993.***

17. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.

18. Drs. Soedjarwo dkk. **Dampak sosial budaya akibat menyempitnya lahan pertanian 1984.**

19. Prof. Padmo Wahyono, SH.

Bahan - Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 1984

20. Drs. A.A.Gede Putra Agung, Drs. I. Nengah Musta Sejarah Pendidikan Daerah Bali’ 92.

21. Sinar Grafika. **Sistem Pendidikan Nasional UU no. 2 Tahun 1989.**

22. PT. Pabelan **Garis - Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993.**

23. **Laporan Kelurahan Bendungan Hilir Tahun 1992/1993**

24. **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tanah Abang Tahun 1993**

25. **Laporan Kelurahan Bendungan Hilir Tahun 1987/1988**

26. Departemen Pendidikan Dan kebudayaan

Pengarahan Menteri pada Rapat Kerja Nasional Tahun 1993.

27. Suara Karya **Guru jadi sorotan utama dalam Rakernas Departemen Pendidikan Dan KeBudayaan 1993.**

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Drs. H. Mohammad Namawi.
Umur : 62 tahun
Pekerjaan : Tokoh masyarakat
Alamat : Jl. Batik no.1 Rt. 11 Rw.01.
2. Nama : Komaruddin
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Jl. Bendungan Hilir III no. 4.
3. Nama : H. Syahrowardi, SH.
Umur : 66 tahun
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Jl. Bendungan Hilir VII no. 5.
4. Nama : Plies Handianto
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Budayawan
Alamat : Jl. Bendungan Hilir XII no. 14.
5. Nama : Asmir Yalis
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Gg. Al Fallah Bendungan Hilir. Rt.08/01.
6. Nama : H. Maimun ilyas
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Tokoh masyarakat
Alamat : Jl. Danau Diatas no.121.
7. Nama : Idris Sofyan
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Jl. Danau Matano No.5
8. Nama : H. Mohammad Noor

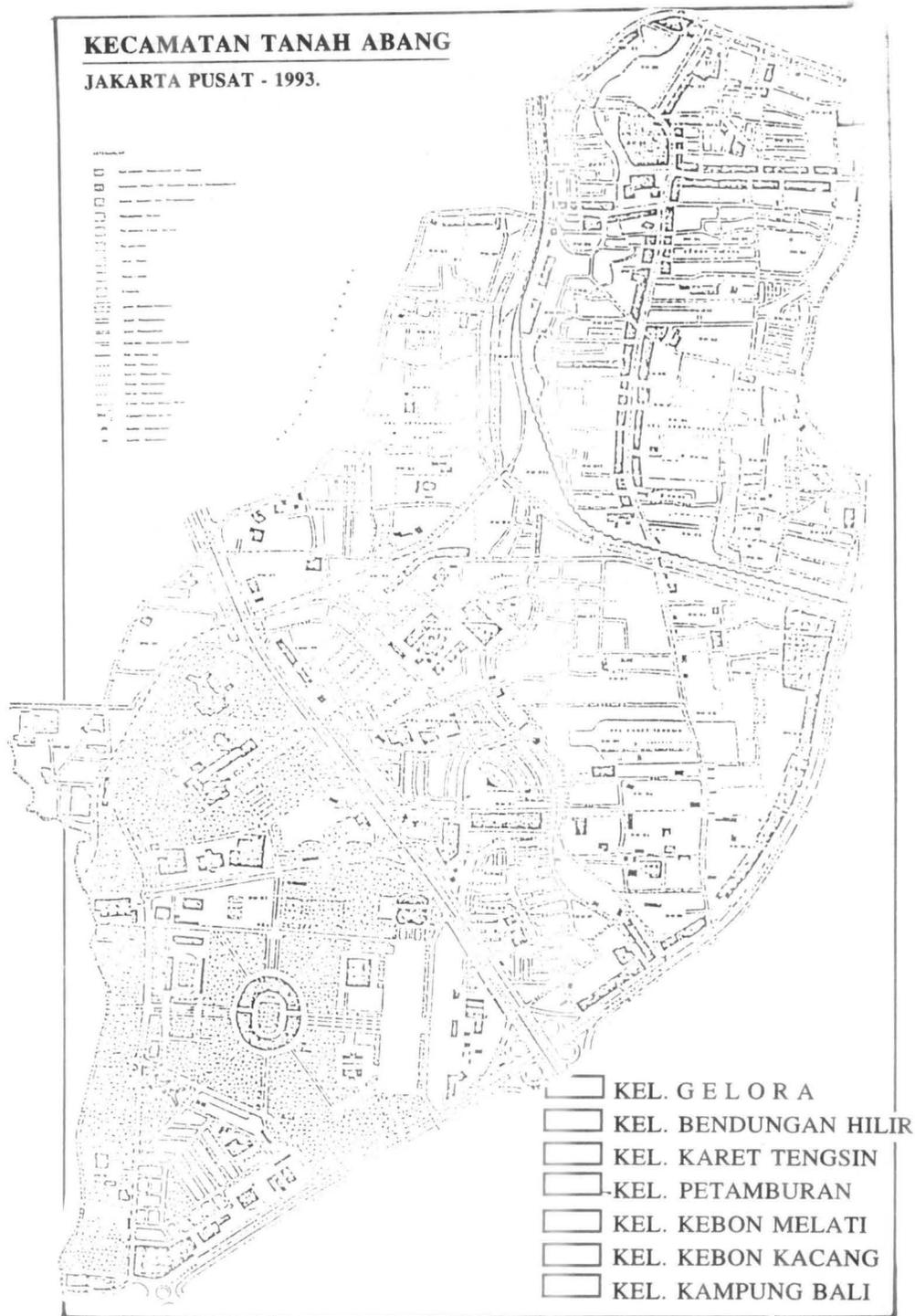
- Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Jl. Penjompongan Baru no.21. RT.11/05
9. Nama : Ny. May Muningali
Umur : 57 tahun
Pekerjaan : Tokoh Agama
Alamat : Jl. Pejompongan Rt. 010/ 07
10. Nama : H. Moh. Sidik
Umur : 67 tahun
Pekerjaan : Tokoh Agama
Alamat : Jl. Taman Bendungan Hilir No. 12.
11. Nama : Yamin Effendi
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Gg. Sekolah Rt. 020 / Rw. 04
12. Nama : Drs. Mursidi
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Tokoh Pendidikan
13. Nama : Drs. Soekijo
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : Tokoh Pendidikan
Alamat : Kancam Dikbud Kec. Tanah Abang
14. Nama : Anisah
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Tokoh Pendidikan
Alamat : Kebon Melati IV. no. 46A Rt. 06/09.
15. Nama : Ratna HR.
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Tokoh Pendidikan
Alamat : Jl. Kota Bambu Utara No. 23 Rt. 012 / Rw. 01

16. Nama : Sri Hartini S.
 Umur : 41 tahun
 Pekerjaan : Tokoh Pendidikan
 Alamat : Jl. Penjernihan VII/5. Kel. Bendungan Hilir
17. Nama : M. Haris
 Umur : 36 tahun
 Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
 Alamat : Jl. Kebembem Rt. 13 Rw. 11.
 Karet Tengsin Kec. Tanah Abang
18. Nama : Hanety
 Umur : 37 Tahun
 Pekerjaan : Tokoh Pendidikan
 Alamat : Jl. Danau Limboto A. 13.C. Rt.21/04
 Kel. Bendungan Hilir.
19. Nama : Utin Utiamah
 Umur : 39 tahun
 Pekerjaan : Tokoh Pendidikan
 Alamat : Jl. danau Limboto No. 10. B. Rt. 20/04
 Kel. Bendungan Hilir
20. Nama : Djalaludin
 Umur : 50 tahun
 Pekerjaan : Toko Masyarakat
 Alamat : Jl. KH. Mas Mansyur 25A. Rt 05/04
 Kec. Tanah Abang
21. Nama : Masniari E. Rambe.
 Umur : 47 tahun
 Pekerjaan : Toko Pendidikan
 Alamat : Jl. Danau Towuti EI/40
 Penjompongan Kel. Bendungan Hilir.
22. Nama : Zulfikar AM
 Umur : 45 tahun
 Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
 Alamat : Jl. karet Pasar baru VII Rt. 04 / 02
 Karet Tengsin, Kec. Tn. Abang.
23. Nama : Aminah
 Umur : 46 tahun
 Pekerjaan : Tokoh Agama
 Alamat : Jl. Menteng Tenggulun No. 07
 Kec. Tn. Abang.

24. Nama : Sri Kusdarwati
 Umur : 44 tahun
 Pekerjaan : Budayawan
 Alamat : Jl. Kebon kacang 43. Rt. 13 / 08
25. Nama : E r l i s
 Umur : 45 tahun
 Pekerjaan : Tokoh Pendidikan
 Alamat : Jl. Petamburan V/15.
 kec. Tanah Abang.
26. Nama : Rusmini
 Umur : 42 tahun
 Pekerjaan : Budayawan
 Alamat : Jl. Petamburan VII No. 18 Rt. 10/ 07.
27. Nama : Sunarsih
 Umur : 40 tahun
 Pekerjaan : Budayawan
 Alamat : Jl. KH. Mas Mansyur 25 A/03
 Kec. Tanah Abang
28. Nama : Syahdinar
 Umur : 40 tahun
 Pekerjaan : Budayawan
 Alamat : Jl. Taman Bendungan Hilir I/01
 Bendungan Hilir, Kec. Tanah. Abang.
29. Nama : Laurentin Sunarti
 Umur : 45 tahun
 Pekerjaan : Tokoh Pendidikan
 Alamat : Jl. Taman Bendungan Hilir I/12
 Bendungan Hilir, Kec. Tanah. Abang.
30. Nama : Nila Suliana
 Umur : 46 tahun
 Pekerjaan : Budayawan
 Alamat : Jl. Bendungan Hilir 23/01. Rt.07/09.

KECAMATAN TANAH ABANG

JAKARTA PUSAT - 1993.





Gambar 1. Kantor Kelurahan Bendungan Hilir
Jl. Penjernihan I. Jakarta Pusat



Gambar 2. Kantor Kecamatan Tanah Abang
Jl. K.H. Mas Mansyur 130. Jakarta Pusat.



**Gambar 3. Kantor Walikotamadya Jakarta Pusat
Jl. Tanah Abang I/1. Jakarta Pusat.**



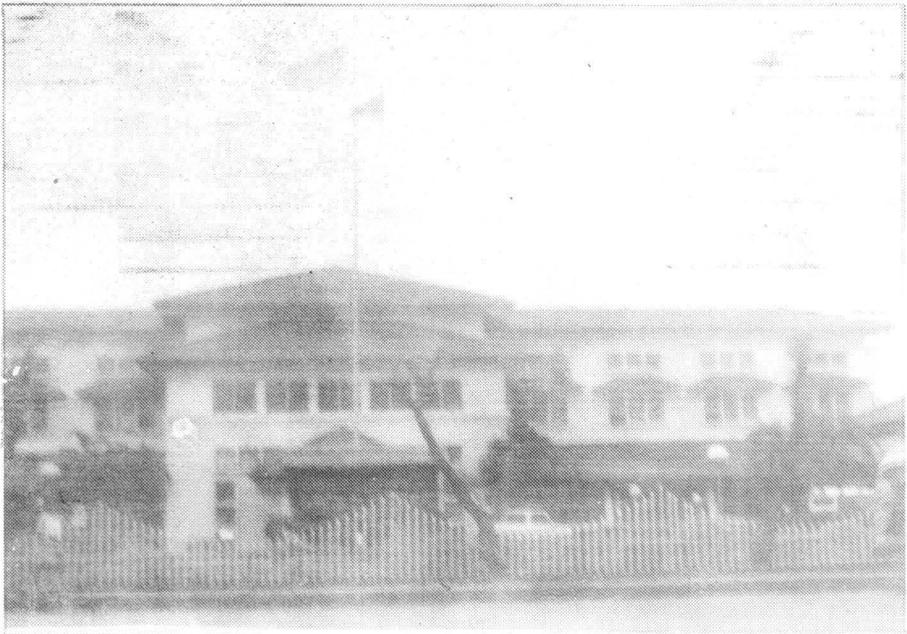
**Gambar 4. Mahasiswa Penyetaraan Diploma II Guru
Sekolah Dasar Semester V Tahun 1993**



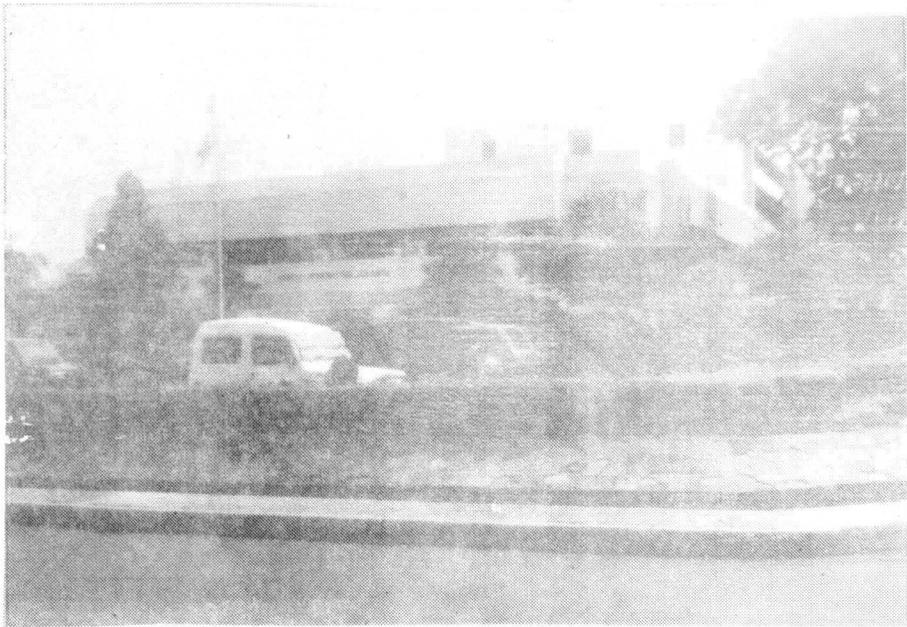
**Gambar 5. Pelajar SMA Pembina 14
Jl. Danau Limboto, Jakarta Pusat.**



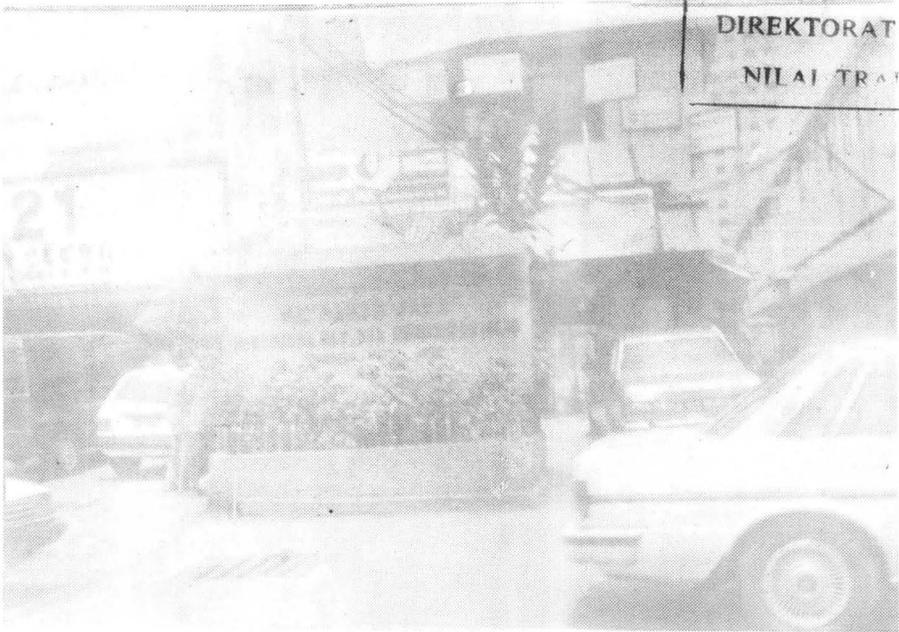
**Gambar 6. Pelajar SMA Muhammadiyah
Jl. Taman Bendungan Jatiluhur.**



Gambar 7. WISMA BENHIL
Jl. Bendungan Hilir Raya



Gambar 8. Kantor RSAL Dr. Mintohardjo
Jl. Bendungan Hilir Raya



Gambar 9. Lokasi PD. Pasar Jaya Bendungan Hilir
Jl. Bendungan Hilir Raya, Jakarta Pusat.



Gambar 10. Kerajinan Ukiran Jepara Untuk Dekorasi
Perkawinan Adat Betawi nyaris punah.
Jl. Bendungan Hilir Raya, Jakarta Pusat.

